



**ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA
KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2014-2018**

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh derajat Strata Satu (S-1)

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Oleh

Livia Margarita

NPM : 4315500081

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Livia Margarita, yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri untuk mendapatkan gelar. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggungjawabannya sepenuhnya berada pada saya.

Tegal, Juli 2019

Yang Menyatakan,



Livia Margarita

**ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA
KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2014-2018**

Oleh :

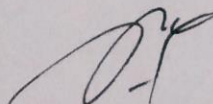
Livia Margarita

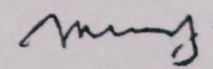
NPM : 4315500081

Disetujui Oleh Pembimbing

Dosen Pembimbing I

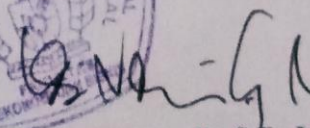
Dosen Pembimbing II



Dr. H. Tabrani, MM
NIPY. 25512121960


Drs. Baihaqi Fanani, M.M, AK,CA
NIPY. 1576981964

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal


Dr. Dien Noviany R., S.E., M.M., Ak, CA,
NIPY. 136628111975



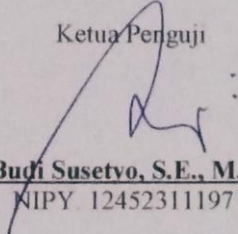
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul :

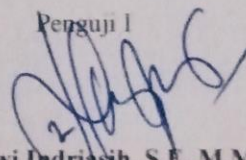
**“ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA
KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2014-2018”**

Yang diajukan oleh Livia Margarita, NPM 4315500081 telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 juli 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

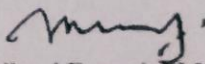
Ketua Penguji


Budi Susetvo, S.E., M.Si.
NIPY. 124523111971

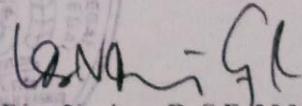
Penguji I


Dr. Dewi Indriasih, S.E., M.M.
NIPY. 15661651980

Penguji II


Drs. Baihaqi Fanani, M.M., Ak, Ca
NIPY. 1576981964

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal


Dr. Dien Noviany R., S.E., M.M., Ak, Ca,
NIPY. 136628111975

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kemudahan ada kesulitan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya pada Tuhanmulah kamu berharap.”
(QS. Al-Insyirah: 6-8)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipesembahkan kepada :

- 1. Bapak dan Mamah, yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan dan keberhasilan saya.*
- 2. Adik-adik saya, Levi Dwi Prayogi dan Lufqi Evan Khafizh, yang menjadi penyemangat untuk penulis ini.*
- 3. Sahabat-sahabatku Asih, Tia, Alfi dan Indah yang senantiasa memberikan dukungan moril untuk saling menguatkan.*
- 4. Orang-orang disekitarku yang selalu memberi semangat.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan. Data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tegal tahun anggaran 2014-2018. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis *trend*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal tahun anggaran 2014-2018 dari rasio efektivitas sangat baik dengan rata-rata yaitu 102,84%, rasio efisiensi sangat baik dengan rata-rata yaitu 1,26% dan rasio pertumbuhan pada pertumbuhan PAD sangat baik dengan rata-rata yaitu 10,39%, pertumbuhan pendapatan sangat baik dengan rata-rata yaitu 8,29%, pertumbuhan belanja operasi tertinggi sangat baik dengan rata-rata yaitu 3,51%, pertumbuhan modal sangat baik dengan rata-rata yaitu 95,53%. Sedangkan pada rasio kemandirian keuangan daerah masih rendah dengan rata-rata yaitu 17,87%, rasio keserasian pengalokasian penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada keserasian yang dipergunakan belanja operasi masih rendah dengan rata-rata yaitu 69,42% dan belanja modal masih rendah dengan rata-rata yaitu 16,40%.

Kata kunci : Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan.

ABSTRACT

This study aims to determine the financial performance of the Tegal Regency Government based on regional financial independence ratios, effectiveness ratios, efficiency ratios, harmony ratios, and growth ratios. The Data used is quantitative data with secondary data sources obtained from the Financial Statements of the Regional Government (LKPD) of Tegal Regency for the 2014-2018 fiscal years. The research method uses descriptive analysis with a qualitative approach. Data analysis techniques use trend analysis.

The results showed that the financial performance of the Tegal Regency Government in the 2014-2018 fiscal years from the effectiveness ratio was very good with an average of 102.84%, a very good efficiency ratio with an average of 1.26% and a very good growth ratio in PAD growth with an average of 10.39%, very good income growth with an average of 8.29%, the highest growth in operating expenditure is very good with an average of 3.51%, capital growth is very good with an average of 95, 53%. While the regional financial independence ratio is still low with an average of 17.87%, the harmony ratio of allocating the use of Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) to the harmony used by operating expenditure is still low with an average of 69.42% and capital expenditure still low with an average of 16.40%.

Keywords: *Financial Performance, Regional Financial Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Harmony Ratio, Growth Ratio.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014-2018”**. Yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata-1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Pancasakti Tegal.

Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini telah dibantu berbagai pihak. Sehingga penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Dien Noviany R., S.E., M.M., Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. H Tabrani, MM selaku Dosen Pembimbing I, yang selalu memberikan bimbingan, nasehat, dan dukungannya selama penulis menyelesaikan Skripsi ini.
3. Bapak Drs. Baihaqi Fanani, M.M, Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan pengarahan, bimbingan, dan motivasi dalam penyelesaian Skripsi ini.
4. Serta Orang tua Bapak Romadhon dan Mamah Kusnenti yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.
5. Adik-adikku tercinta Levi Dwi Prayogi dan Lufqi Evan Khafizh yang telah menjadi inspirasi dan sumber semangat.
6. Serta sahabatku Asih, Tia, Alfi, indah yang selalu memberi motivasi dan saran.

7. Teman-temanku Akuntansi A 2015 yang selalu memberi semangat dan dukungan yang menjadi penyemangat untuk penulis ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penulisan Skripsi ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan karena keterbatasan kemampuan penulis, untuk itu sebelumnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan proposal skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Tegal, Juli 2019

Livia Margarita

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori.....	9
B. Studi Penelitian Terdahulu	41
C. Kerangka Pemikiran.....	44
BAB III : METODE PENELITIAN	47
A. Pemilihan Metode	47
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel	47
D. Teknik Pengumpulan Data	50

E. Teknik Analisis Data	51
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
B. Hasil Penelitian	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel 2.1 Studi Penelitian Terdahulu	42
2. Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	49
3. Tabel 3.2 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	51
4. Tabel 3.3 Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah.....	51
5. Tabel 3.4 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah.....	52
6. Tabel 4.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	64
7. Tabel 4.2 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah.....	66
8. Tabel 4.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....	67
9. Tabel 4.4 Rasio Belanja Operasi terhadap APBD.....	69
10. Tabel 4.5 Rasio Belanja Modal terhadap APBD.....	70
11. Tabel 4.6 Rasio Pertumbuhan Pendapatan.....	72
12. Tabel 4.7 Rasio Pertumbuhan Belanja.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran.....	46
2. Gambar 4.1 Bagan Organisasi BPKAD Kabupaten Tegal.....	63
3. Grafik 4.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	64
4. Grafik 4.2 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah.....	66
5. Grafik 4.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....	68
6. Grafik 4.4 Rasio Belanja Operasi terhadap APBD.....	69
7. Grafik 4.5 Rasio Belanja Modal terhadap APBD.....	70
8. Grafik 4.6 Rasio Pertumbuhan Pendapatan.....	73
9. Grafik 4.7 Rasio Pertumbuhan Belanja.....	75
10. Grafik Analisis Trend Dalam Neraca.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tegal Tahun 2014.....	85
2. Neraca Kabupaten Tegal Tahun 2014.....	88
3. Laporan Arus Kas Kabupaten Tegal Tahun 2014	92
4. CaLK Kabupaten Tegal Tahun 2014	95
5. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tegal Tahun 2015.....	97
6. Neraca Kabupaten Tegal Tahun 2015.....	100
7. Laporan Arus Kas Kabupaten Tegal Tahun 2015.....	103
8. CaLK Kabupaten Tegal Tahun 2015	107
9. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tegal Tahun 2016.....	109
10. Neraca Kabupaten Tegal Tahun 2016.....	112
11. Laporan Arus Kas Kabupaten Tegal Tahun 2016	115
12. CaLK Kabupaten Tegal Tahun 2016	119
13. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tegal Tahun 2017.....	122
14. Neraca Kabupaten Tegal Tahun 2017.....	125
15. Laporan Arus Kas Kabupaten Tegal Tahun 2017	128
16. CaLK Kabupaten Tegal Tahun 2017	132
17. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tegal Tahun 2018.....	135
18. Neraca Kabupaten Tegal Tahun 2018.....	138
19. Laporan Arus Kas Kabupaten Tegal Tahun 2018	141
20. CaLK Kabupaten Tegal Tahun 2018	145

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Nasib suatu daerah menjadi daerah yang maju atau berkembang sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membuat aset daerah terjaga juga keutuhannya (Lazyra, 2016).

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian menjadi UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Penerapan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik juga didasarkan atas azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Masita et.al, 2014). Penciptaan terhadap kemandirian daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah yang harus berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah (Pelealu, 2013).

Untuk mencapai suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan harus fokus pada sektor-sektor strategis dan potensial pada wilayah tersebut baik sektor riil, finansial, maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan juga sangat penting dilakukan secara berkala melalui sajian data statistik yang berkualitas. Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah (Lazyra, 2016).

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah mempengaruhi tingkat kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah, khususnya pendapatan asli daerah. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Desentralisasi ini menunjukkan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dirinya sendiri secara otonom (Masumah, 2017).

Namun pada pelaksanaannya tidak semua daerah mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerahnya sehingga masih memerlukan

bantuan dari pemerintah pusat. Ditambah dengan masyarakat sekarang yang semakin kritis seperti tuntutan kejujuran, tuntutan sistem pemerintah bersih, tuntutan program kesejahteraan masyarakat, mengharuskan pemerintah untuk semakin meningkatkan kualitas kinerjanya dari tahun ke tahun. Maka dari itu diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah tersebut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah sendiri. Hal tersebut sesuai dengan ciri penting dari suatu daerah otonom yang mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya yaitu terletak pada strategi sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan di bidang keuangan daerah (Bisma dan Susanto, 2010).

Kinerja yaitu pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi jika pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Dan untuk sebaliknya apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Lubis dan Hafni, 2017).

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan beberapa rasio antara lain rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat

yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efisiensi yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima Rasio keserasian adalah menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) yaitu mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya, dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Pramono, 2014).

Menurut Suharmanto Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal menuturkan bahwa masalah yang terjadi di Kabupaten Tegal terkait kinerja keuangan, untuk target kinerja keuangan tahun 2018 yaitu sebesar 15,29% dari perbandingan realisasi pendapatan asli daerah APBD sebesar Rp. 399,9 miliar dibagi dengan pendapatan APBD sebesar Rp. 2,6 triliun. Dan ternyata pada tahun 2018 kinerja keuangan hanya sebesar 9,36% atau Rp. 107.269.252.909 lebih rendah dibandingkan tahun 2017 mencapai 11,93% atau Rp. 107.269.252.909. Masalah ini juga sampai Triwulan II tahun 2018 dalam mencapai realisasi

penyerapan anggaran baik fisik maupun keuangan antara lain lambannya penyerahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), masih adanya Surat Keputusan (SK) kegiatan yang belum diproses dan kurang konsistennya terhadap Rencana Kegiatan Operasional (RKO) dan anggaran kas (Suharmanto, 2018).

Berdasarkan fenomena diatas membuat peneliti tertarik melakukan penelitian, khususnya dalam kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal karena hasil tahun 2018 sebesar 9,36% tidak sesuai target kinerja keuangan daerah tahun 2018 yang sebesar 15,29%. Jadi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tegal belum sesuai dengan target.

Dalam penelitian Riris Anggaraini (2015) hanya menggunakan rasio keuangan yaitu rasio kemampuan daerah, rasio kemandirian daerah dan rasio efektivitas di Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2010-2014. Sedangkan penelitian ini menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan. Dengan menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tegal tahun anggaran 2014-2018.

Untuk mengetahui bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal selama 5 (lima) tahun terakhir dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan. Maka peneliti mengambil judul “Analisis Rasio

Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014-2018”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian pada latar belakang di atas, peneliti membuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Rasio Kemandirian Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014-2018?
2. Bagaimanakah Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014-2018?
3. Bagaimanakah Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014-2018?
4. Bagaimanakah Rasio Keserasian Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014-2018?
5. Bagaimanakah Rasio Pertumbuhan Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014-2018?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis rasio kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tahun anggaran 2014-2018, dimana menggunakan rasio keuangan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui rasio kemandirian Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014-2018.
2. Untuk mengetahui rasio efektivitas Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014-2018.
3. Untuk mengetahui rasio efisiensi Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014-2018.
4. Untuk mengetahui rasio keserasian Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014-2018.
5. Untuk mengetahui rasio pertumbuhan Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014-2018.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Aspek teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan lebih banyak wawasan tentang rasio keuangan daerah.
 - b. Diharapkan dapat mengembangkan akuntansi sektor publik, khususnya dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Tegal

Sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tegal dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang meningkatkan kualitas kinerja untuk periode selanjutnya.

b. Bagi Universitas Pancasakti Tegal

Sebagai sumbang pemikiran dan pustaka untuk akademik, serta sebagai salah satu referensi dalam penelitian oleh mahasiswa lain di Universitas Pancasakti Tegal.

c. Bagi pihak lain

Dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk mengkaji lebih lanjut tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Otonomi Daerah

Menurut UU Nomor 32 tahun 2004 dalam Anissatun Masumah (2017) tentang pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 4 dan 6 menyatakan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 merupakan revisi dari UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Misi dari undang-undang tersebut menurut Mardiasmo (2018) adalah desentralisasi. Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pusat ke pemerintah yang lebih rendah, tetapi juga pelimpahan beberapa

wewenang pemerintahan kepihak swasta dalam bentuk privatisasi. Secara teoritis otonomi daerah diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu : *pertama*, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemertaan hasil-hasil pembangunan (keadilan) diseluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan petensi yang tersedia masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ketingkat pemerintah yang lebih rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Mardiasmo (2018) menjelaskan pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial.

Menurut Inpres No. 7 tahun 1999 dalam Lubis dan Hafni (2017) tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pengertian Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seseorang pegawai diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun pendapat ahli mengenai pengertian kinerja, sebagai berikut :

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2009) dalam Lubis dan Hafni (2017) mengemukakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Halim (2012) dalam Lubis dan Hafni (2017:23) kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Adanya tuntutan pertanggungjawaban kinerja keuangan oleh masyarakat mengharuskan pemerintah daerah otonom untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerjanya. Penilaian kinerja tersebut harus dapat memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol kinerja keuangan daerah tersebut. Untuk mewujudkan transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah.

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 (tiga) maksud. *Pertama*, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja adalah untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit

kerja. Oleh karena itu pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. *Kedua*, ukuran kinerja sektor publik menggunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. *Ketiga*, ukuran Kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2018).

Tujuan sistem pengukuran kinerja menurut Mardiasmo (2018) adalah :

- a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *bottom up*),
- b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi,
- c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*,
- d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Manfaat pengukuran kinerja menurut Mardiasmo (2018) adalah :

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen,
- b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan,

- c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja,
- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward & punishment*) secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati,
- e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi,
- f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi,
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah dan memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.

Menurut Mardiasmo (2018) informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja adalah :

1. Informasi Finansial

Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis variasi (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan.

Analisis variasi secara garis besar berfokus pada :

1) Varian pendapatan

Varian pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah ada tiga yaitu :

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersumber dari :

(1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah semua pendapatan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah atau pajak. Jenis pajak kabupaten / kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir (Abdul Halim, 2004:64 dalam Joko Pramono, 2014:95).

(2) Restribusi Daerah

Restribusi daerah adalah pendapatan yang berasal dari restribusi dari daerah, yang meliputi restribusi pelayanan kesehatan, restribusi air, restribusi pertokoan, restribusi kelebihan muatan dan sebagainya (Abdul Halim, 2004:64 dalam Joko Pramono, 2014:95).

(3) Bagian Laba Usaha Daerah

Bagian laba usaha daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Pramono, 2014).

(4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Lain-lain pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Pendapatan ini berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan penerimaan jasa giro, selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan oleh daerah (Pramono, 2014).

b) Dana Perimbangan

Dana perimbangan yaitu dana yang berasal dari penerimaan anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dana perimbangan terdiri atas (Abdul Halim, 2004:65 dalam Joko Pramono, 2014:95) :

- (1) Dana bagi hasil, dibagi menjadi dua yaitu dana bagi hasil yang bersumber dari pajak, contohnya pajak bumi dan bangunan, bea hak atas tanah dan bangunan dan dana bagi

hasil yang bersumber dari sumber daya alam manusia yaitu pemberian hak atas tanah negara.

(2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum yaitu dana yang berasal dari anggaran pendapatan negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal, (kebutuhan fiskal kapasitas fiskal daerah) dari alokasi dasar. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 20% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. Porsi DAU antara provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbalan kewenangan antara provinsi, kabupaten dan kota.

(3) Dana alokasi khusus (DAK)

Dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu (Abdul Halim, 2004:65 dalam Joko Pramono, 2014:96). Besarnya dana alokasi khusus ditetapkan setiap tahun dalam APBD berdasarkan masing-masing bidang kegiatan disesuaikan

dengan ketersediaan dana dalam APBD. Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khususnya yang merupakan unsur daerah.

c) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah (bantuan yang tidak mengikat dan pendapatan dana darurat).

2) Varian pengeluaran

Varian pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari :

a) Varian belanja rutin

Anggaran belanja rutin merupakan anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat lancar, rutin dan secara terus menerus yang dimaksudkan untuk menjaga kelemahan roda pemerintahan dan memelihara hasil-hasil pembangunan. Dengan telah diberikannya kewenangan untuk mengelola daerah, maka belanja rutin diprioritaskan pada optimalisasi fungsi dan tugas rutin perangkat daerah. Peningkatan belanja rutin yang diusulkan oleh setiap penganggaran harus diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan belanja rutin sedapat mungkin menerapkan pendekatan anggaran

kinerja, hal tersebut bertujuan untuk memudahkan analisis dan evaluasi hubungan antara kebutuhan dan hasil serta manfaat yang diperoleh, anggaran belanja rutin meliputi belanja APBD, belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah, belanja sekretaris daerah dan perangkat lainnya.

b) Varian belanja pembangunan

Anggaran belanja pembangunan adalah anggaran yang disediakan untuk membiayai proses perubahan, yang merupakan perbaikan dan pembangunan menuju kemajuan yang ingin dicapai. Pengeluaran yang dianggarkan dalam pengeluaran pembangunan didasarkan atas alokasi sektor industri, pertanian dan kehutanan, hukum, transportasi, dan lain sebagainya (Abdul Halim, 2004 : 223-226 dalam Joko Pramono, 2014:97).

2. Informasi Nonfinansial

Informasi nonfinansial dapat dijadikan sebagai tolok ukur lainnya. Informasi nonfinansial dapat menambah keakuratan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen . *Balanced Scorecard* yaitu teknik pengukuran kinerja yang komprehensif yang banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa. Dengan *Balanced Scorecard* kinerja organisasi diukur tidak hanya berdasarkan aspek finansialnya saja

akan tetapi juga aspek nonfinansial. Pengukuran metode *Balanced Scorecard* melibatkan empat aspek, yaitu :

- 1) Perspektif finansial (*financial perspective*),
- 2) Perspektif kepuasan pelanggan (*customer perspective*),
- 3) Perspektif efisiensi proses internal (*internal process efficiency*),
- 4) Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspective*).

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 menjelaskan bahwa anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diperlukan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, anggaran bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Tetapi tidak tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari satu tahun. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuntungan, antara lain karena :

- 1) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik,

- 2) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan,
- 3) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum,
- 4) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah,
- 5) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik (Devi Dian, 2016).

APBD adalah suatu anggaran daerah (Abdul Halim, 2004:16 dalam Joko Pramono, 2014:98). Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa APBD merupakan program pemerintah daerah dalam bentuk angka. Unsur-unsur anggaran pendapatan dan belanja daerah yaitu :

- 1) Rencana kegiatan suatu daerah dan uraian secara rinci,
- 2) Terdapat sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya dan aktifitas serta biaya-biaya yang merupakan batasan maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan,
- 3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka, Periode anggaran yaitu biasanya 1 tahun.

Prinsip-prinsip penganggaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Demokratis, mengandung makna bahwa anggaran negara (di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran, harus ditetapkan melalui suatu proses yang mengikut sertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat, selain harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat;
- b) Adil, berarti bahwa anggaran negara haruslah diarahkan secara optimum bagi kepentingan orang banyak dan secara proporsional, dialokasikan bagi semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya;
- c) Transparan, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran negara harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, tetapi juga oleh masyarakat umum;
- d) Bermoral tinggi, berarti bahwa pengelolaan anggaran negara harus berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku, dan juga senantiasa mengacu pada etika dan moral yang tinggi;
- e) Berhati-hati, berarti bahwa pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara berhati-hati, karena jumlah sumber daya yang terbatas dan mahal harganya. Hal ini semakin terasa penting jika dikaitkan dengan unsur hutang negara;

- f) Akuntabel, berarti bahwa pengelolaan keuangan negara haruslah dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secara intern maupun ekstern kepada rakyat.

Pada dasarnya, peranan anggaran dalam organisasi pemerintahan sama dengan peranan anggaran dalam organisasi komersial. Baik dalam organisasi pemerintahan, maupun dalam organisasi komersial, anggaran ditujukan untuk perencanaan dan pengawasan aktivitas yang dilakukan. Satu hal yang membedakan anggaran dalam organisasi pemerintahan dengan organisasi komersial adalah terletak pada pencatatan anggaran. Dalam organisasi pemerintahan, yang menggunakan akuntansi dana, anggaran merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari siklus akuntansi. Karena anggaran merupakan bagian integral dalam akuntansi dana, maka dilakukan pencatatan pembentukan dan realisasi anggaran. Dibandingkan dengan organisasi komersial, anggaran dalam organisasi pemerintahan bersifat lebih formal. Karenanya, organisasi pemerintahan mencatat anggaran agar mudah dalam pengendalian dan penentuan kesesuaian segala aktivitas yang dilakukan dengan peraturan yang tercermin dalam anggaran. Sedangkan dalam organisasi komersial, anggaran dimaksudkan untuk tujuan perencanaan dan pengendalian, tanpa dimaksudkan untuk tujuan pencatatan akuntansi (Baldrick Siregar dan Boni Siregar, 1996:10) dalam (Dian Devi, 2016:19).

4. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Dalam peraturan Bupati Tegal No. 18 tahun 2014 tentang sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dijelaskan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintahan daerah.

Sistem akuntansi pemerintah daerah ini bertujuan untuk :

- a. Menjamin untuk semua transaksi-transaksi keuangan yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tegal yaitu di SKPKD dan SKPD sudah dicatat secara besar,
- b. Menjamin untuk semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material,
- c. Menjamin untuk informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berasal dari suatu proses (siklus akuntansi) sehingga bisa ditelusur kebenarannya.

Sistem akuntansi pemerintah daerah ini berlaku untuk BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam melakukan identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, transaksi dan kejadian keuangan, serta penyajian laporan.

Untuk menyusun Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) tersebut, perlu memperhatikan beberapa tahapan sebagai berikut :

a. Identifikasi prosedur

Untuk tahapan penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah dimulai dari memahami proses bisnis pada pemerintah daerah khususnya terkait siklus pengelolaan keuangan daerah. Maka dari itu siklus itulah tim penyusun SAPD mengidentifikasi prosedur-prosedur apa saja yang harus dibuat.

b. Menentukan pihak-pihak terkait

Setelah prosedur-prosedur teridentifikasi, ditentukan pihak-pihak yang terkait pada masing-masing prosedur. Masing-masing pihak memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output yang diinginkan.

c. Menentukan dokumen terkait

Setelah itu prosedur dan pihak terkait ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dokumen-dokumen yang mengalir pada prosedur sekaligus menentukan pihak-pihak pengguna dokumen tersebut. jadi semua dokumen tersebut diidentifikasi dokumen mana yang valid untuk dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan jurnal.

d. Menentukan jurnal standar

Pada setiap prosedur yang telah ditetapkan tim penyusun menelaah SAP dan kebijakan akuntansi terkait. Berdasarkan penelaahan tersebut

tim penyusun menentukan jurnal debit dan kredit yang akan digunakan.

e. Menuangkannya dalam langkah teknis

Untuk langkah terakhir dalam penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah menyusun langkah teknis. Langkah teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, dokumen apa saja yang diperlukan dokumen-dokumen yang terkait. Selain itu, diberikan ilustrasi atau format pencatatan dalam bentuk penjurnalan akuntansi pada setiap bagian atau transaksi yang membutuhkan pencatatan.

5. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Menurut Munawir (1993:2) dalam Dian Kemala Devi (2016) dijelaskan bahwa laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Laporan keuangan menurut Peraturan Bupati Tegal No. 18 tahun 2014 adalah informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan umum dari pelaporan keuangan pemerintah menurut Ghozali dan Ratmono (2015:72) yaitu :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi kewajiban, dan ekuitas dana pemerinth daerah,
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah,
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi,
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya,
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya,
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Menurut M. Yusuf (2010:1) dalam Yasrie (2017), laporan keuangan pemerintah daerah sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada *stakeholder* yang didalamnya mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan termasuk komponen *asset* yang tercermin dalam neraca daerah dimana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran.

Pada PP No. 71 tahun 2010 dalam Joko Pramono (2014) komponen laporan keuangan terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL),
- 3) Neraca,
- 4) Laporan Operasional (LO),
- 5) Laporan Arus Kas (LAK),
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Menurut Peraturan Bupati Tegal No. 17 tahun 2014 menjelaskan sebagai berikut :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing perbandingan dengan anggarannya dalam satu periode.

- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan SAL disingkat LPSAL yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL, tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SILPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

- 3) Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4) Laporan Operasional

Laporan operasional disingkat LO yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya.

5) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas disingkat LAK merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan kas yaitu semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum daerah. Dan Pengeluaran kas yaitu semua aliran kas yang keluar dari bendahara daerah.

6) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

7) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan disingkat CaLK merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi,
- b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro,
- c) Ikhtisar untuk pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target,
- d) Informasi untuk tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya,
- e) Rincian dan penjelasan untuk masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan,
- f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan,
- g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan (Abdul Halim, 2014).

Berdasarkan bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Dasar pengukuran dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
- b) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh entitas pelaporan,
- c) Setiap kebijakan akuntansi tentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan (Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, 2018).

Setiap entitas pelaporan yaitu mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan kepada pengguna laporan keuangan yaitu : masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawasan dan lembaga pemeriksa, pemberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta manajemen pemerintah.

Hal ini untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu untuk para pengguna sebagai mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan bahwa pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergeneration equity*)

Membantu para pengguna merupakan untuk mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Laporan keuangan mempunyai karakteristik. Karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a. Relavan

Laporan keuangan bisa dikatakan relavan jika informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relavan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relavan :

1. Memiliki manfaat umpan balik

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka masa lalu.

2. Memiliki manfaat prediktif

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

1) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2) Dapat Diverifikasi

Informasi yang disajikan agar laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serja istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. oleh itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

6. Analisis Laporan Keuangan

Menurut Munawir (1993:35) dalam Dian Kemala Devi (2016) menjelaskan untuk analisa laporan keuangan terdiri dari penelahan atau mempelajari dari pada hubungan-hubungan dan tendensi atau kecenderungan (*trend*) yaitu menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.

Ada dua metode analisa yang sesuai oleh prinsip penganalisa laporan keuangan itu analisa horizontal dan analisa vertikal. Analisa horizontal adalah analisa dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya. Metode horizontal ini disebut pula sebagai metode analisa dinamis. Analisa vertikal yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, oleh itu dengan perbandingan antar pos yang satu dengan pos lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan diketahui bahwa keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Analisa vertikal ini tersebut juga sebagai metode analisa yang statistik karena kesimpulan yang dapat diperoleh hanya untuk periode itu saja tanpa mengetahui perkembangan.

Teknik analisa yang biasa menggunakan dalam analisa laporan keuangan yaitu sebagai berikut :

a. Analisa perbandingan laporan keuangan, merupakan metode dan teknik analisa dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih, dengan menunjukkan:

- 1) Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah,
- 2) Kenaikan atau penurunan jumlah dalam rupiah,
- 3) Kenaikan atau penurunan dalam presentase,
- 4) Perbandingan uang dinyatakan dengan rasio,
- 5) presentase dari total.

Analisa dengan metode ini akan dapat diketahui perubahan yang terjadi, akan perubahan mana yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

b. *Trend* atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam presentase(*trend percentage analysis*), adalah suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi dari pada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun.

c. Laporan dengan presentase per komponen atau *common size statement*, merupakan suatu metode analisa untuk mengetahui presentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya.

d. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau

untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu.

- e. Analisa sumber dan penggunaan kas (*cash flow statement analysis*), yaitu itu suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu.
- f. Analisa rasio adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan rugi laba secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.
- g. Analisa perubahan laba kotor (*gross profit analysis*), merupakan suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang *dibudgetkan* untuk periode tersebut.
- h. Analisa *break-even*, yaitu suatu analisa untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian, tapi belum memperoleh keuntungan. Dengan analisa *break-even* ini juga akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan.

7. Rasio Keuangan Daerah

- a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Lubis dan Hafni (2017:24), Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian diukur dengan:

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{bantuan pusat+ pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah berarti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat atau provinsi) semakin rendah dan demikian sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam bangunan daerah. Semakin tinggi rasio keuangan daerah, maka semakin tinggi

partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Rasio Efektivitas

Menurut Abdul Halim (2018) Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu mengoptimal PAD secara maksimal sehingga diketahui berapa realisasi dan target penerimaan PAD sehingga dapat diketahui apakah kegiatan itu efektif atau tidak (Faud, 2016) Rasio efektivitas diukur dengan :

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

c. Rasio Efisiensi

Menurut Yasrie (2017) Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai

kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100% semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengfesiensikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah menurut Mardiasmo (2013) dalam Lazyra (2016) yang menyatakan bahwa bila semakin kecil rasio efisien berarti kinerja daerah semakin baik. Rumus Rasio efisiensi diukur dengan :

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

d. Rasio Keserasian

Menurut Halim (2012) dalam Pramono (2014:25) Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentasi belanja modal yang digunakan untuk menyediakan saranaprasaran ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio keserasian terdiri dari rasio belanja rutin terhadap total belanja dan rasio belanja modal terhadap total belanja, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah

untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Rasio tersebut diukur dengan :

$$\text{Rasio belanja rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio belanja modal terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

e. Rasio Pertumbuhan

Menurut Abdul Halim (2018) Rasio pertumbuhan mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai selama beberapa periode. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Rasio pertumbuhan dapat diketahui dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan rasio total pendapatan daerah, sedangkan tingkat pengeluaran daerah dapat diketahui dengan rasio pertumbuhan belanja rutin/operasi dan pertumbuhan belanja modal.

Rasio pertumbuhan diukur dengan :

$$\text{Rasio pertumbuhan} = \frac{\text{PADt1} - \text{PADt0}}{\text{PADt0}} \times 100\%$$

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

$t_1 - t_0$ = Realisasi penerimaan pendapatan tahun yang dikurangi tahun sebelumnya

t_0 = Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya.

3. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan apa yang akan peneliti teliti mengenai rasio kinerja keuangan dalam pemerintahan daerah yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, beberapa diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1

Studi Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Zulkifly Prabowo Damanhuri (2013)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2007-2011	Pola hubungan kemandirian daerah Pemerintah Kota Jawa Timur dalam lima tahun masih menunjukkan pola hubungan instruktif dengan rasio kemandirian daerah rata-rata mencapai 22,27%. Terkecuali pada Pemerintah Kota Surabaya yang memiliki rasio rata-rata 56,56% (pola hubungan partisipatif), bahkan pada tahun 2011 Pemerintah Kota Surabaya mencapai nilai rasio 100,75% (pola hubungan delegatif).

lanjutan...

2.	Joko Pramono (2014)	Analisis Rasio Keuangan untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kota Surakarta Tahun Anggaran 2010-2011	Rasio Kemandirian Pemerintah Kota surakarta pada tahun 2010 sebesar 15,83% . Dilanjutkan... 2011 sebesar efektivitas pada tahun 2010 sebesar 94,81% dan pada tahun 2011 sebesar 102,9% , terjadi peningkatan dari efektif menjadi sangat efektif. Pemerintah daerah kota surakarta dalam mengelolah PAD sudah sangat efesien karena kurang dari 60%. Rasio keserasian mengalami penurunan dari 90,24% (2010) menjadi 86,90% (2011) demikian pula rasio belanja modal terhadap APBD masih relatif kecil walaupun terdapat kenaikan dari 9,65% menjadi 13,07%. Rasio pertumbuhan sebesar 58,93%. Rasio DSCR pada tahun 2010 dan 2011 sangat baik karena rasio DSCR diatas 2,5.
3.	Riris Dwi Anggaraini (2015)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanggerang Tahun Anggaran 2010-2014	Pola hubungan kemandirian daerah kota Tanggerang dalam lima tahun dengan rata-rata sebesar 33%. Rasio IKR menunjukan Pemerintah Kota Tanggerang cukup mampu untuk membiayai belanja rutin namun masih memerlukan bantuan dana dari pihak lain, dengan rasio IKR 34,05%

Dilanjutkan...

Lanjutan

4.	Uyik Retnaning Sayekti (2016)	Analisis tingkat Kemandirian, Efektivitas dan Efisiensi Terhadap PAD (Studi Kasus pada DPPKAD Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2011-2014)	Rasio Efektivitas pada tahun 2011 sebesar 112,74%, tahun 2012 sebesar 119,29%, tahun 2013 sebesar 142,62% dan tahun 2014 sebesar 126,19%, tingkat efektivitas sudah mencukupi kriteria penilaian rasio Efektivitas karena lebih dari 100%. Tingkat efisiensi atas PAD dari tahun 2011-2014 masih belum dikatakan efisien karena dibawah 100%
5.	Muhammad Zuhri dan Ahmad Soleh (2016)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011-2016	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah tergolong rendah sekali (rata-rata 2,44% per tahun), rasio efektivitas PAD tahun 2011, 2013 dan 2014 berjalan kurang efektif yang ditunjukkan dengan nilai rasio antara 75%-89%, namun pada tahun 2012 berjalan sangat efektif dengan nilai rasio mencapai 107,35, rasio aktivitas / keserasian dari sisi rasio belanja operasi tergolong baik yakni dengan nilai rasio antara 50%-100% atau rata-rata 76% per tahun sedangkan rasio belanja modal tergolong tidak baik karena memiliki nilai rasio kurang dari 50% atau dengan nilai rata-rata per tahun sebesar 23,2% per tahun. Dilanjutkan... pertumbuhan pendapatan asli

Lanjutan

			daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun pertumbuhan tersebut tergolong pertumbuhan sedang dengan nilai rata-rata pertahun sebesar 45,22% per tahun.
--	--	--	---

Sumber : Berbagai Literature Penelitian

Dari tabel studi penelitian terdahulu tentang analisis rasio keuangan Pemerintah Daerah dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini. Dalam penelitian Riris Dwi Anggaraini (2015) hanya menggunakan rasio keuangan yaitu rasio kemampuan daerah, rasio kemandirian daerah dan rasio efektivitas di Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2010-2014. Sedangkan penelitian ini menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan. Dengan menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tegal Tahun anggaran 2014-2018.

4. Kerangka Pemikiran

Pada awal tahun anggaran, pemerintah daerah menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan daerah untuk satu tahun anggaran. Setelah tahun anggaran berakhir, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berkewajiban

menyusun laporan keuangan yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggung jawaban penggunaan (APBD) dalam daerah tersebut.

LKPD yang dibuat oleh Kepala Daerah sesuai dengan basis akuntansi yang telah ditetapkan pemerintah. Sebelum tahun 2015 sesuai PP No. 24 tahun 2005 masih menggunakan basis kas, dimana laporan keuangan yang dihasilkan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan CaLK setelah tahun 2015 menggunakan basis akrual sesuai PP No. 71 tahun 2010 dengan laporan keuangan yang dihasilkan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK.

Dari LKPD yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah, dapat dianalisis kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

Model kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pemilihan Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menghitung rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan kemudian menganalisis hasil yang diperoleh berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah.

B. Lokasi Penelitian

Peneliti melaksanakan penelitian pada BPKAD (badan pengelolaan keuangan dan aset daerah) Kabupaten Tegal yang berwenang menghimpun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal dan membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tegal.

C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi konseptual

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2016).

b. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan adanya target yang diterapkan berdasarkan potensi riil daerah (Joko Pramono, 2014).

c. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Muthia, 2016).

d. Rasio Keserasian

Belum ada patokan yang resmi mengenai berapa besarnya rasio belanja rutin maupun rasio belanja pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan

berapa besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan (Abdul Halim, 2018).

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Abdul Halim, 2018).

2. Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini dijelaskan dengan tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Rumus	Skala
Rasio Kemandirian	$\frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Bantuan pusat + pinjaman}} \times 100\%$	Rasio
Rasio Efektivitas	$\frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$	Rasio
Rasio	$\frac{\text{Biaya memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$	Rasio

Dilanjutkan...

Lanjutan

Efisiensi		
Rasio Keserasian	Rasio belanja rutin/operasi = $\frac{Total\ Belanja\ Rutin/Operasi}{Total\ APBD} \times 100\%$ Rasio Belanja Modal = $\frac{Total\ Belanja\ Modal}{Total\ APBD} \times 100\%$	Rasio
Rasio Pertumbuhan	Rasio Pertumbuhan Pendapatan = $\frac{Pendapatan\ t1 - Pendapatan\ t0}{Pendapatan\ t0} \times 100\%$ Rasio Pertumbuhan Belanja = $\frac{Belanja\ t1 - Belanja\ t0}{Belanja\ t0} \times 100\%$	Rasio

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014-2018 yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan cara observasi, dokumentasi dan wawancara.

1. Observasi

Peneliti melakukan observasi atau pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan melakukan pengamatan secara langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal.

2. Dokumentasi

Peneliti dengan cara mencatat atau mengkopi dokumen-dokumen, arsip-arsip maupun data lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

3. Wawancara

Wawancara atau dialog dengan staf bidang yang berkaitan dengan kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Dalam peneliti ini menggunakan metode penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Data yang berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (LKPD) dianalisis dengan menggunakan beberapa rasio keuangan dan peneliti juga menggunakan analisis trend yaitu :

a. Rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian dihitung dengan rumus :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan pusat+pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 3.2
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian
Rendah sekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

Sumber : Kepmendagri N0. 690.900.327/1996 dalam Joko Pramono (2014:106).

b. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas dihitung dengan rumus :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3.3
Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	Presentase Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90 – 100
Cukup Efektif	>80 – 90
Kurang Efektif	>60 – 80
Tidak Efektif	≤60

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327/1996 dalam Joko Pramono (2014:106)

c. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi dihitung dengan rumus :

$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$

Tabel 3.4
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah

Kriteria Efisiensi	Presentase Efisiensi
Tidak Efisien	100% keatas
Kurang Efisien	90% - 100%

Cukup Efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat Efisien	Kurang dari 60%

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327/1996 dalam Joko Pramono (2014:107).

d. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio belanja rutin/operasi} = \frac{\text{Total Belanja rutin/operasi}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio belanja modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

e. Rasio Pertumbuhan

Untuk menghitung rasio pertumbuhan menggunakan rumus :

$$\text{Rasio pertumbuhan pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan t1} - \text{Pendapatan t0}}{\text{Pendapatan t0}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio pertumbuhan belanja} = \frac{\text{Belanja t1} - \text{Belanja t0}}{\text{Belanjat0}} \times 100\%$$

f. Analisis *Trend*

Merupakan salah satu teknik analisis laporan keuangan dan termasuk metode analisis horizontal. Analisis ini menggambarkan kecenderungan perubahan suatu pos laporan keuangan selama periode (dari tahun ketahun). Pada teknik analisis data laporan keuangan untuk beberapa periode dinyatakan dalam satuan presentase atas dasar tahun dasar. Neraca dan laporan laba rugi yang disusun dalam presentase *trend* dapat memberikan informasi mengenai tingkat pertumbuhan masing-masing pos laporan keuangan dari tahun ke tahun Prastowo (1995) dalam Annisatun Masumah (2017).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Badan Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal

Dalam Renstra BPKAD Kabupaten Tegal tahun 2014-2019 dijelaskan bahwa BPKAD Kabupaten Tegal merupakan salah satu lembaga teknis yang dibentuk peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dinas-dinas daerah, yang berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pendataan, penetapan dan penagihan, perencanaan dan pengendalian operasional pendapatan, perbendaharaan, anggaran, akuntansi dan pelaporan serta aset daerah yang dipimpin oleh seorang kepala unit eselon II b yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Dinas PPPKAD Kabupaten Tegal sesuai tugas, pokok dan fungsinya melaksanakan urusan-urusan pemerintahan daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan satuan kerja pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Tegal melakukan fungsi penerimaan pendapatan dan belanja daerah.

BPKAD Kabupaten Tegal dibagi menjadi 1 sekretariat dan 6 bidang (per 1 november 2014). Bidang-bidang tersebut yaitu bidang anggaran, bidang akuntansi, bidang aset daerah, bidang perbendaharaan, bidang pengendalian perencanaan operasional pendapatan (bidang P2OP), bidang pendataan, penetapan dan penagihan (bidang PPP).

2. Visi dan Misi

Visi badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Tegal :
“terwujudnya tata kelola pendapatan, keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan transparan”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Tegal menetapkan misi sebagai berikut (renstra BPKAD Kabupaten Tegal tahun 2014-2019) :

- a. Mewujudkan aparatur yang bersih dan *responsive* terhadap pelayanan, pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah,
- b. Mengoptimalkan pendapatan daerah,
- c. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabilitas,
- d. Mewujudkan tertib pengelolaan aset daerah.

3. Tujuan dan Sasaran

Dalam renstra BPKAD Kabupaten Tegal tahun 2014-2019 dijelaskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan pendapatan asli daerah yang mampu mendukung otonomi daerah,
- 2) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan aset daerah,
- 3) Meningkatkan pengembangan sistem pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah,
- 4) Meningkatkan optimalisasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah,
- 5) Terwujudnya badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Tegal selaku koordinator pendapatan, pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah yang baik dan benar,
- 6) Mewujudkan sistem pelaporan keuangan daerah yang akuntabel,
- 7) Menyusun anggaran berpihak pada kepentingan publik dan kebutuhan riil masyarakat,

8) Mewujudkan fungsi anggaran.

b. Sasaran

- 1) Terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah yang mampu mendukung otonomi daerah,
- 2) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas keuangan daerah, sehingga penyusunan dan penetapan APBD murni dan perubahan semakin tepat waktu,
- 3) Terwujudnya pengembangan sistem pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga administrasi semakin tertib.
- 4) Terwujudnya optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga terpenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan,
- 5) Terselenggaranya peningkatan SDM dibidang teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah,
- 6) Terwujudnya keselarasan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan antar dinas/intansi,
- 7) Terwujudnya pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai aturan,
- 8) Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan yang baik,
- 9) Tersusunnya anggaran yang berpihak pada kepentingan publik,
- 10) Tersusunnya *performance budgeting*,
- 11) Terciptanya komitmen politis antara eksekutif dan legislatif,
- 12) Terciptanya disiplin anggaran.

4. Strategi dan Kebijakan

Untuk melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah, BPKAD Kabupaten Tegal menyusun strategi dan kebijakan demi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran (renstra BPKAD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 yaitu :

a. Strategi

- 1) Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi,
- 2) Menumbuhkan kembangkan minat baca aparat pengelola keuangan daerah dalam rangka menambah wawasan,
- 3) Meningkatkan sensitifitas dan kepekaan terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan yang perkembangannya sangat dinamis,
- 4) Menyusun rencana kerja tahunan sebagai dasar berpijak melakukan program kegiatan.

b. Kebijakan

- 1) Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana perkantoran dan mendayagunakan sarana dan prasarana yang ada dalam pelaksanaan tugas pada masing-masing bagian,

- 2) Meningkatkan kompetensi aparatur di bidang pendapatan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah melalui pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat fungsional,
- 3) Meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan mencari peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk penyelenggaraan pembangunan daerah,
- 4) Menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam rangka mensukseskan target PAD,
- 5) Melakukan penyusunan APBD sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan,
- 6) Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD,
- 7) Meningkatkan sistem informasi pengelolaan aset yang mudah diakses melalui pemanfaatan teknologi,
- 8) Meningkatkan pengelolaan aset daerah melalui penataan, pemanfaatan dan optimalisasi aset daerah,
- 9) Melakukan upaya pembaruan dan penyesesuaian terhadap sistem penataan usaha keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku,
- 10) Merumuskan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Tata kerja dan struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Tegal

a. Tata kerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang dalam BPKAD Kabupaten Tegal, terdapat tata kerja sebagai berikut:

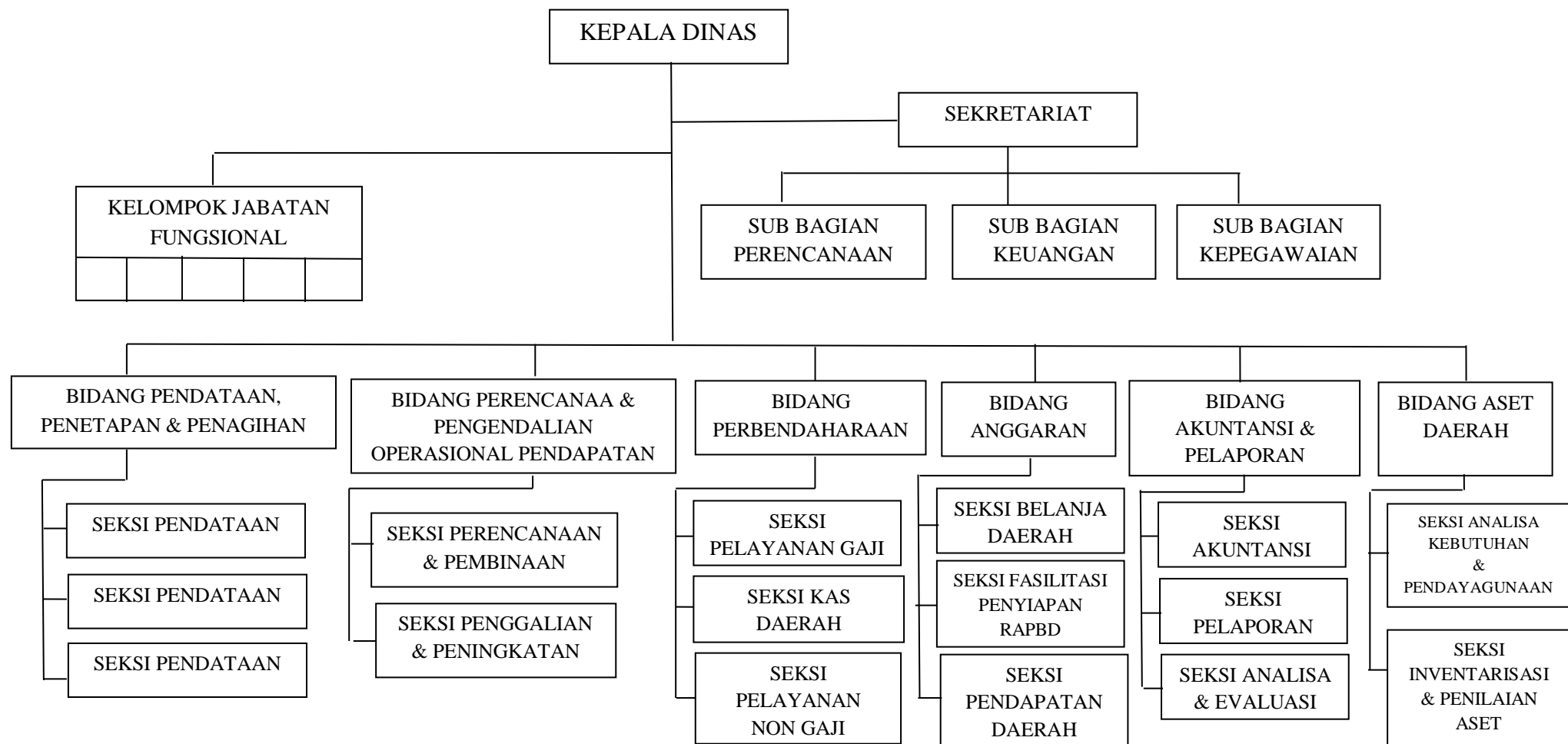
- 1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati,
- 2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing,
- 3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, secara vertikal maupun horisontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain secara dengan tugas pokoknya masing-masing,
- 4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala subbagian, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional Bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing,

- 5) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan pejabat fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab atas masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya,
- 6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain dilingkungan dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja,
- 7) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusun laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan,
- 8) Sekretaris, Kepala Bidang UPTD dan pejabat fungsional menyampaikan laporan Kepada Dinas dan berdasarkan hal tersebut Sekretariat menyusun laporan berkala Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BPKAD Kabupaten Tegal dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.1
Bagan Organisasi BPKAD Kabupaten Tegal



Sumber : Renstra Dinas BPKAD Kab. Tegal tahun 2014-2019

B. Hasil Penelitian

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

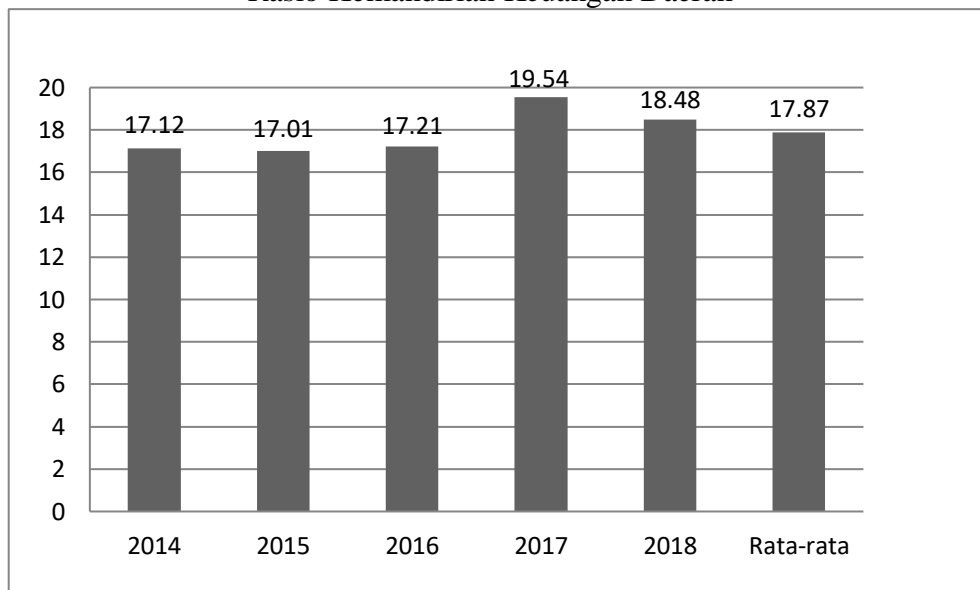
Rasio Kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2014-2018 dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan bantuan dari pusat dan pinjaman, seperti pada tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2018

Tahun	PAD	Bantuan	Pinjaman	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)
2014	253.716.602.369	1.484.366.472.437	0	17,12
2015	304.000.970.135	1.787.067.853.123	0	17,01
2016	316.051.189.733,60	1.825.602.482.074	0	17,21
2017	375.531.165.351,20	1.921.568.586.197	0	19,54
2018	371.345.954.410,62	2.008.586.726.208	0	18,48
		Rata-rata		17,87

Sumber : Data Diolah (2019)

Grafik 4.1
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah



Sumber : Data Diolah (2019)

Dari grafik 4.1 di atas dapat dilihat bahwa kemandirian keuangan daerah untuk Pemerintah Kabupaten Tegal tahun anggaran 2014-2018 menunjukkan kondisi keuangan yang fluktuatif. Peningkatan yang tertinggi pada tahun 2017 sebesar 19,54% dimana sebelumnya rasio kemandirian pada tahun 2016 sebesar 17,21%. Jika dilihat dari rata-rata rasio kemandirian di Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2014-2018 sebesar 17,87% yang masih kurang tingkat kemandirian mencapai dari 50% disebabkan Pemerintah Kabupaten Tegal masih tergantung terhadap bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, yang jumlahnya melebihi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki. Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD agar mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat adalah dengan mengoptimalkan sumber daya yang berpotensi untuk menghasilkan PAD. Pajak dan retribusi harus lebih ditingkatkan penerimaannya, mengingat

wilayah Kabupaten Tegal sangat berpotensi untuk menghasilkan PAD yang cukup besar dikarenakan wilayahnya yang luas dan terdiri dari dataran, pantai dan pegunungan. Pemerintah Kabupaten Tegal seharusnya dapat melihat potensi tersebut sehingga dapat melakukan usaha untuk meningkatkan penerimaan PAD.

2. Rasio Efektivitas

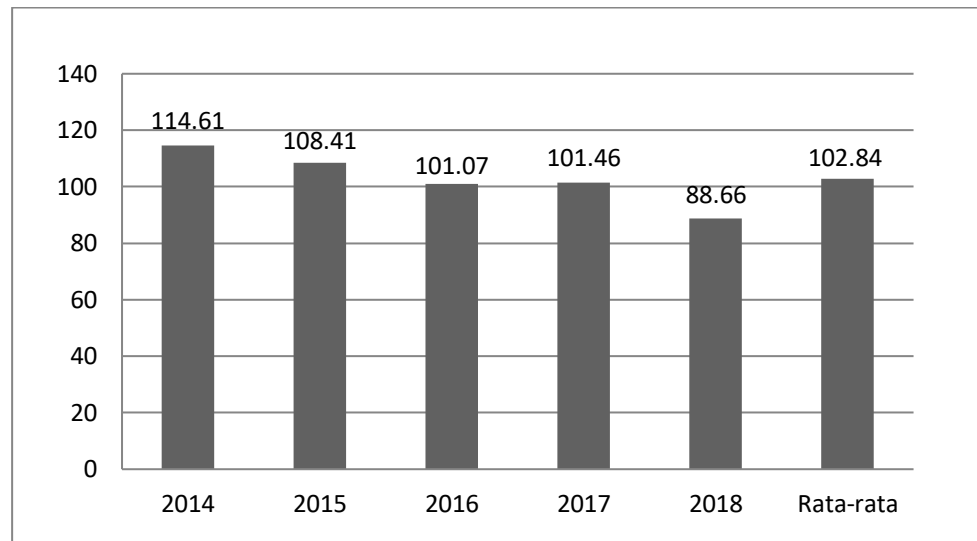
Rasio efektivitas keuangan daerah dihitung dengan membandingkan antara realisasi pengiriman Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target PAD yang telah ditentukan. Tabel rasio efektivitas yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rasio Efektivitas Keuangan Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (%)
2014	253.716.602.369	221.366.940.000	114,61
2015	304.000.970.135	280.411.781.000	108,41
2016	316.051.189.733,60	312.688.892.000	101,07
2017	375.531.165.351,20	370.089.012.000	101,46
2018	371.345.954.410,62	418.830.489.000	88,66
	Rata-rata		102,84

Sumber : Data Diolah (2019)

Grafik 4.2
Rasio Efektivitas Keuangan Daerah



Sumber : Data Diolah (2019)

Berdasarkan grafik 4.2 dilihat efektivitas keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2014-2017 menunjukkan kemampuan untuk merealisasikan PAD dari apa yang telah ditargetkan menunjukkan hasil yang memuaskan, karena selama 4 tahun berturut-turut rasio efektivitas lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang sangat efektif dan artinya Pemerintah Kabupaten Tegal telah mampu merealisasikan PAD sesuai dengan apa yang telah ditargetkan dan bahkan melebihi target. Kemudian tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 88,66% namun presentase tersebut masih dalam kategori cukup efektif hal ini dikarenakan pada tahun 2018 mengalami penurunan PAD yaitu yang didukung dengan perolehan hasil pajak daerah setiap tahun mengalami peningkatan tetapi tahun 2018 mengalami penurunan. Berdasarkan laporan realisasi anggaran Kabupaten Tegal tahun 2014-2018, Pendapatan pajak daerah tahun 2012 sebesar 52.480.614.287, tahun 2015 sebesar 64.737.082.699, tahun 2016 sebesar 68.810.605.561, tahun 2017 sebesar 97.179.813.740 dan pada tahun 2018

sebesar 96.424.287.892. Hal tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal, dimana pajak daerah merupakan salah satu sumber utama PAD.

3. Rasio Efisiensi

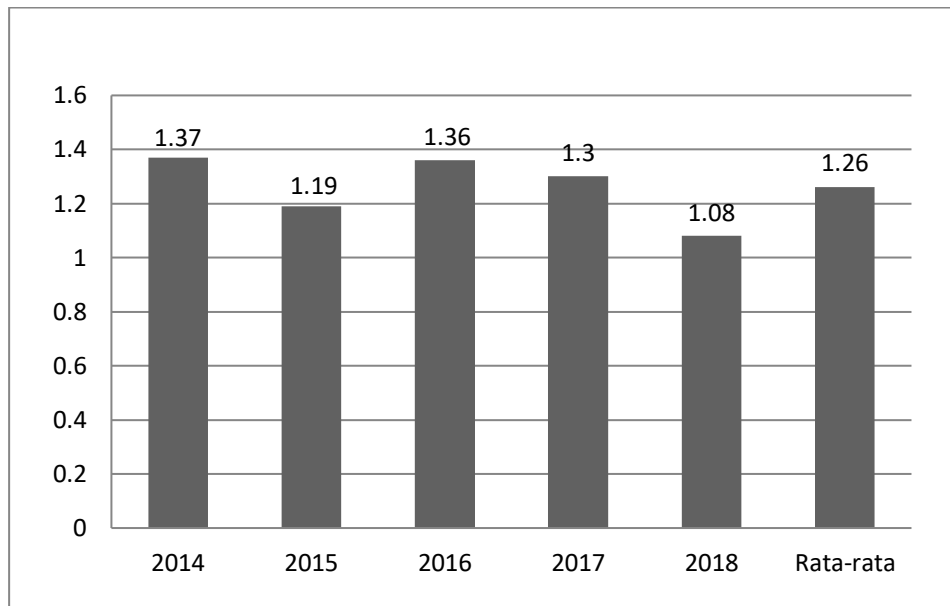
Rasio efisiensi keuangan daerah dihitung dengan membandingkan antara Biaya untuk memungut Pendapatan Asli Daerah yang diterima dengan realisasi PAD yang telah ditentukan. Tabel Rasio efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tegal yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.3
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2018

Tahun	Biaya memungut PAD	Realisasi PAD	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (%)
2014	3.480.046.991	253.716.602.369	1,37
2015	3.634.398.098	304.000.970.135	1,19
2016	4.323.911.952	316.051.189.733,60	1,36
2017	4.889.657.161	375.531.165.351,20	1,30
2018	4.014.823.036	371.345.954.410,62	1,08
	Rata-rata		1,26

Sumber : Data diolah (2019)

Grafik 4.3
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah



Sumber : Data Diolah (2019)

Berdasarkan grafik di atas bahwa efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2014-2018 sudah sangat baik. Dengan tingkat efisiensi tertinggi pada tahun 2014 sebesar 1,37% dan tingkat efisiensi terendah pada tahun 2018 sebesar 1,08%. Jika ditinjau dari penggunaan biaya memungut PAD untuk merealisasikan penerimaan PAD menunjukkan hasil yang memuaskan, karena selama 5 tahun berturut-turut rasio efisiensi yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tegal semakin baik. Salah satu bentuk penghematan anggaran dengan biaya yang sedikit, tetapi hasil yang dicapai dapat maksimal. Prestasi ini harus dipertahankan karena semakin menghemat anggaran sehingga dapat dipergunakan untuk hal lain yang lebih penting.

4. Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti presentase belanja modal untuk sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Tabel rasio belanja operasi dan belanja modal terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2014-2018 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.4
Rasio Belanja Operasi terhadap APBD
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2018

Tahun	Belanja Operasi	Total APBD	Rasio Belanja Operasi (%)
2014	1.485.997.755.304	1.809.241.439.000	82,13
2015	1.472.162.882.985	2.088.158.134.000	70,50
2016	1.546.321.787.664	2.348.492.203.000	65,84
2017	1.611.513.759.083	2.511.082.377.000	65,17
2018	1.704.320.211.333	2.644.381.703.000	64,45
	Rata-rata		69,42

Sumber : Data Diolah (2019)

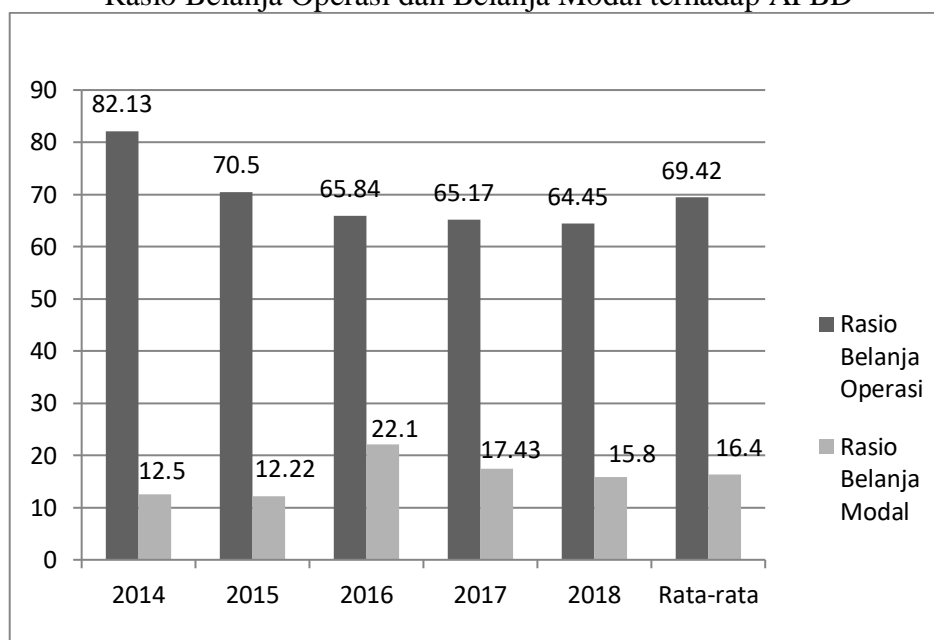
Tabel 4.5
Rasio Belanja Modal terhadap APBD
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2018

Tahun	Belanja Modal	Total APBD	Rasio Belanja Modal (%)
2014	226.087.648.919	1.809.241.439.000	12,50

2015	255.207.688.302	2.088.158.134.000	12,22
2016	516.642.310.814	2.348.492.203.000	22,10
2017	437.758.902.809	2.511.082.377.000	17,43
2018	417.983.021.935	2.644.381.703.000	15,80
	Rata-rata		16,40

Sumber : Data Diolah (2019)

Grafik 4.4
Rasio Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap APBD



Sumber : Data Diolah (2019)

Berdasarkan grafik 4.4 di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah Kabupaten Tegal dialokasikan untuk rasio belanja operasi sehingga rasio keserasian terhadap APBD masih cukup rendah dimana selama kurun waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2014-2018 rata-rata rasio keserasian belanja operasi terhadap APBD lebih besar dibandingkan rasio keserasian belanja modal. Rasio belanja operasi terhadap APBD paling

tinggi pada tahun 2014 dimana terhadap belanja operasi pemerintah Kabupaten Tegal mengalokasikan dannya sebesar 82,13% tetapi tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tegal memperkecil alokasi dannya terhadap belanja operasi menjadi 70,50%. Alokasi terhadap belanja modal meningkat ditahun 2016 menjadi 22,10% setelah sebelumnya ditahun 2015 presentase belanja modal hanya 12,22% dari total APBD. Jadi Pemerintah Kabupaten Tegal mengalokasikan dananya kepada belanja operasi lebih besar sedangkan alokasi pada belanja modal mengalami naik turunnya setiap tahunnya. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Tegal menambahkan alokasi untuk belanja modal agar seimbang. Belanja operasi yang terlalu banyak tidak dapat menambah aset/kekayaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tegal, tetapi menggunakan terlalu banyak belanja operasi untuk memelihara barang modal yang sudah tua umurnya. Maka seharusnya barang modal yang sudah terlalu banyak memakan biaya operasi (biaya pemeliharaan) digantikan dengan barang modal yang baru dengan menggunakan belanja modal sehingga manfaat yang diperoleh dapat lebih optimal, untuk pembangunan yang semakin berkembang.

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran yaitu dihitung dengan membandingkan realisasi

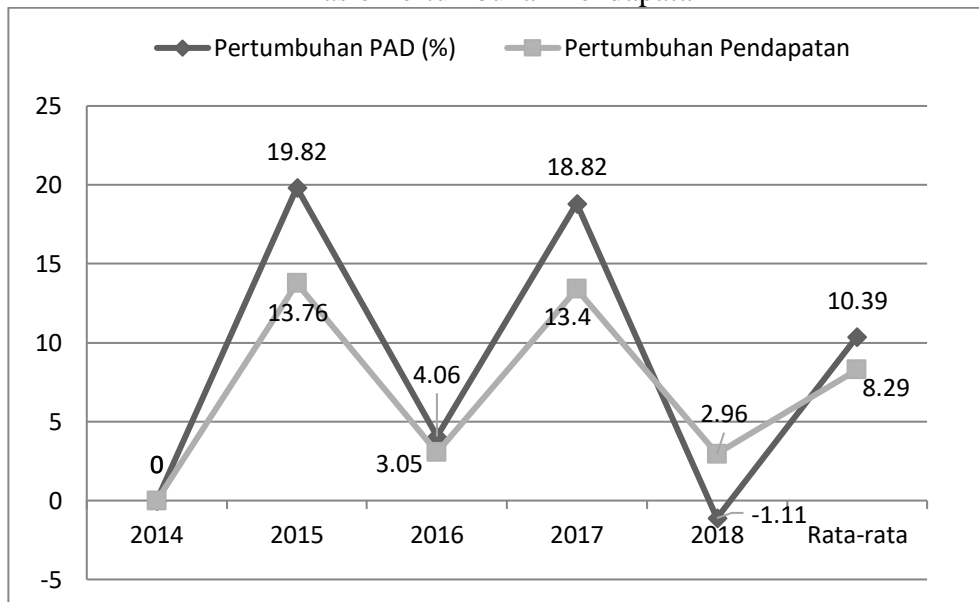
pertumbuhan pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan, Belanja Operasi dan Belanja Modal. Tabel rasio pertumbuhan Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2014-2018 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.6
Rasio Pertumbuhan Pendapatan
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2018

Tahun	PAD	Total Pendapatan	Rasio Pertum buhan PAD (%)	Rasio Pertumb uhan Pendapat an (%)
2014	253.716.602.369	1.843.352.063.500	-	-
2015	304.000.970.135	2.097.095.623.983	19,82	13,76
2016	316.051.189.733,6	2.161.161.059.587,6	4,06	3,05
2017	375.531.165.351,2	2.450.766.553.130,2	18,82	13,40
2018	371.345.954.410,6	2.523.434.958.170,62	-1,11	2,96
Rata-rata			10,39	8,29

Sumber : Data Diolah (2019)

Grafik 4.5
Rasio Pertumbuhan Pendapatan



Sumber : Data Diolah (2019)

Dari grafik di atas terlihat bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2014-2018 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Tegal belum mampu mempertahankan pertumbuhan PAD kurang stabil, dimana Pertumbuhan PAD paling tinggi pada tahun 2015 sebesar 19,82% dan pertumbuhan PAD paling rendah tahun 2018 sebesar -1,11% sehingga rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Tegal selama 5 tahun sebesar 8,29%.

Pertumbuhan pendapatan dari tahun 2014-2018 mengalami fluktuatif. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Tegal belum mempertahankan pertumbuhan pendapatan kurang stabil, Pertumbuhan pendapatan paling tinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 13,76% dan pertumbuhan pendapatan

paling rendah tahun 2018 sebesar 2,96% sehingga rata-rata pertumbuhan pendapatan Kabupaten Tegal selama 5 tahun sebesar 10,39%.

Pertumbuhan PAD dan pertumbuhan pendapatan seharusnya dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan sehingga mencerminkan bahwa daerah tersebut selalu memperbaiki kinerjanya. Seperti halnya Pemerintah Kabupaten Tegal seharusnya memiliki pertumbuhan pendapatan yang terus naik agar penerimaan yang dihasilkan semakin besar dan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan sehingga tidak harus selalu menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

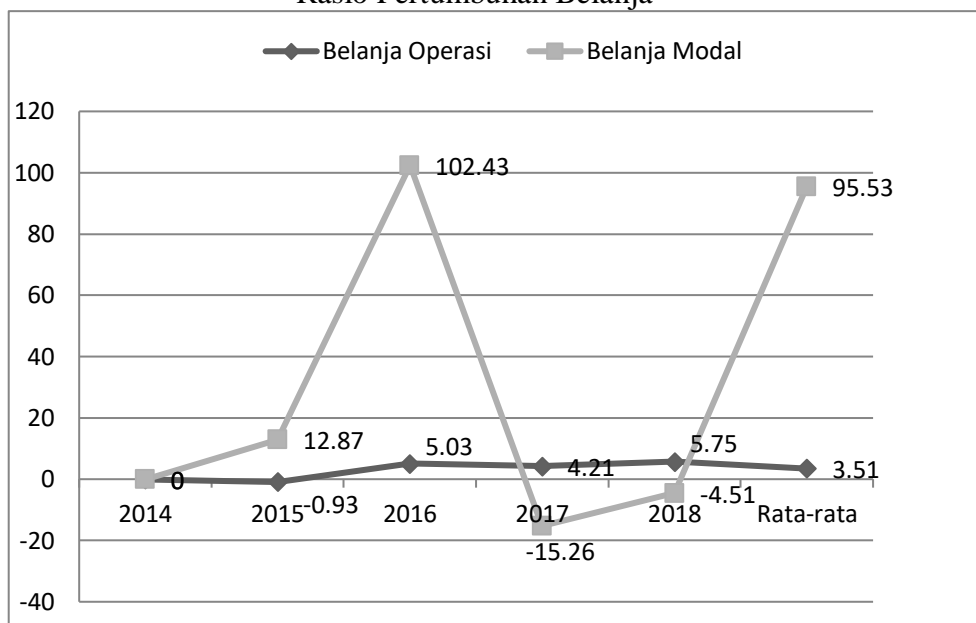
Rasio pertumbuhan belanja yaitu belanja operasi dengan belanja modal. Tabel rasio pertumbuhan belanja Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2014-2018 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.7
Rasio Pertumbuhan Belanja
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi (%)	Rasio Pertumbuhan Belanja Modal (%)
2014	1.485.997.755.304	226.087.648.919	-	-
2015	1.472.162.882.985	255.207.688.302	-0,93	12,87
2016	1.546.321.787.664	516.642.310.814	5,03	102,43
2017	1.611.513.759.083	437.758.902.809	4,21	-15,26
2018	1.704.320.211.333	417.983.021.935	5,75	-4,51
Rata-rata			3,51	95,53

Sumber : Data Diolah (2019)

Grafik 4.6
Rasio Pertumbuhan Belanja



Sumber : Data Diolah (2019)

Dari grafik di atas rasio pertumbuhan belanja menunjukkan bahwa belanja operasi pada tahun 2014-2018 mengalami peningkatan. Belanja operasi paling tinggi pada tahun 2018 sebesar 5,75% dan belanja operasi paling rendah tahun 2015 sebesar -0,93% sehingga rata-rata pertumbuhan belanja operasi Kabupaten Tegal selama 5 tahun sebesar 3,51%. Sedangkan untuk belanja modal mengalami peningkatan yang paling tinggi yaitu pada tahun 2016 sebesar 102,43% dan paling rendah pada tahun 2017 sebesar -15,26% sehingga rata-rata pertumbuhan belanja modal Kabupaten Tegal selama 5 tahun sebesar 95,53%.

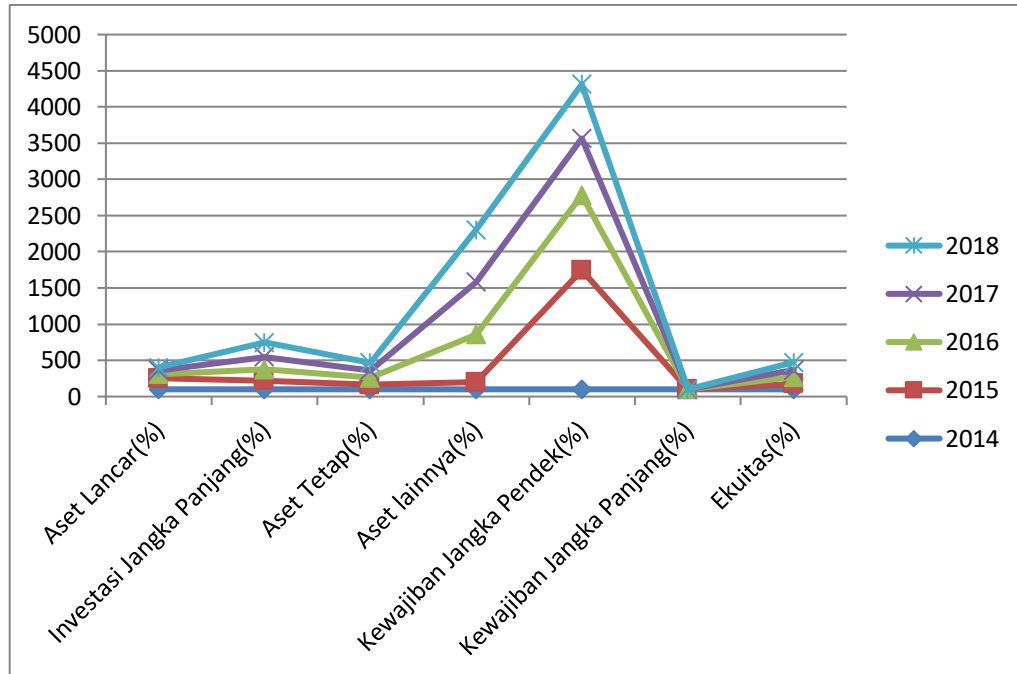
Jadi rasio pertumbuhan belanja operasi dan belanja modal terjadi peningkatan paling fluktuatif pada tahun 2016 yaitu belanja operasi sebesar 5,03% dan belanja modal 102,43% dan mengalami penurunan pada tahun

2017 sebesar 4,21%. Hal tersebut disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal memperkecil belanja modal yaitu sebesar -15,26%. Rasio pertumbuhan belanja, yaitu belanja operasi dan belanja modal seharusnya dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan sehingga mencerminkan bahwa perusahaan tersebut selalu memperbaiki kinerjanya.

6. Analisis *Trend*

Analisis Trend merupakan teknik analisis untuk melihat kecenderungan perkembangan perusahaan yang dinyatakan dalam presentase. Dengan teknik ini akan menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun. Pada teknik ini data laporan keuangan untuk beberapa periode dinyatakan dalam satuan presentase trend dapat memberikan informasi mengenai tingkat pertumbuhan masing-masing pos laporan keuangan dari tahun ke tahun Prastowo (1995) dalam Anissatun Masumah (2017).

Grafik Analisis Trend
Dalam NERACA Kabupaten Tegal
Per 31 Desember 2014-2018



Sumber : Data Diolah (2019)

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa presentase aset lancar mengalami penurunan setiap tahunnya, penurunan drastis terjadi pada tahun 2018, dimana presentase aset lancar 42%. Pada investasi jangka panjang mengalami peningkatan pada tahun 2018 yaitu bahwa pemerintah menyertakan modal pada pemerintah sebesar 196%, tidak adanya aset lancar tetapi pada investasi permanen pemerintah meningkatkan nilainya.

Aset tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2018, pemerintah meningkatkan nilai peralatan dan mesin yang cukup tinggi dibandingkan dengan aset tanah yang mengalami penurunan. Terbukti pada tahun 2018 pemerintah mulai aktif memperbaiki

sarana dan prasarana, baik melalui perbaikan jalan, peningkatan pelayanan kesehatan dll.

Kewajiban jangka pendek pada tahun 2018 semakin menurun dibandingkan tahun 2017 artinya bahwa dalam hal perolehan dananya melalui pinjaman pemerintah Kabupaten Tegal mengurangi porsi nya dan berfokus kepada pengoptimalan PAD. Sama halnya dengan kewajiban jangka panjang bahwa pemerintah tidak memprosentasikan sama sekali. Begitupun sama halnya dengan ekuitas dan meningkat ditahun 2018, dimana pada tahun 2018 walaupun dalam neraca Pemerintah Kabupaten Tegal tidak mengalokasikan dananya pada aset lancar tetapi secara keseluruhan terjadi peningkatan, dimana pemerintah Kabupaten Tegal mengurangi presentase kewajiban.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas sebelumnya maka dapat disimpulkan :

1. Rasio kemandirian keuangan daerah untuk Pemerintah Kabupaten Tegal dari tahun 2014 sebesar 17,12% namun di Tahun 2015 mengalami penurunan. Kenaikan rasio kemandirian terjadi lagi pada tahun 2016 dan 2017 secara berturut-turut sebesar 17,21% dan 19,54%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali dengan presentase sebesar 18,48% sehingga rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tegal selama 5 tahun sebesar 17,87% namun semuanya masih di bawah 25%. Sehingga Pemerintah Kabupaten Tegal masih tergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi,
2. Rasio efektivitas keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2014 sampai 2017 sudah baik karena persentasenya di atas 100%, tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 88,66% persentase tersebut masih dalam kategori cukup efektif. Sehingga rata-rata rasio efektivitas keuangan daerah kabupaten tegal selama 5 tahun sebesar 102,84%.
3. Rasio efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2014-2018 dalam menggunakan biaya untuk memungut PAD sudah sangat baik karena termasuk kategori sangat efisiensi sesuai dengan

kriterianya kurang dari 1 (satu) atau 100%. Dengan rata-rata rasio efisiensi selama 5 tahun sebesar 1,26%.

4. Rasio keserasian Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2014-2018 untuk pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dipergunakan untuk belanja operasi paling tinggi pada tahun 2014 yaitu 82,13% dan paling rendah pada tahun 2018 yaitu 64,45% dengan rata-rata selama 5 tahun yaitu 69,42% sedangkan penggunaan untuk belanja modal paling tinggi pada tahun 2016 yaitu 22,10% dan paling rendah pada tahun 2015 yaitu 12,22% dengan rata-rata selama 5 tahun yaitu 16,40%.
5. Rasio pertumbuhan PAD paling tinggi tahun 2015 sebesar 19,82% dan paling rendah sebesar -1,11% dengan rata-rata selama 5 tahun yaitu 8,29%. Pertumbuhan Pendapatan paling tinggi tahun 2015 sebesar 13,76% dan paling rendah tahun 2018 sebesar 2,96% dengan rata-rata selama 5 tahun yaitu 10,39% . Pertumbuhan belanja operasi paling tinggi pada tahun 2018 sebesar 5,75% dan paling rendah tahun 2015 sebesar -0,93% dengan rata-rata selama 5 tahun yaitu 3,51%. Pertumbuhan modal paling tinggi tahun 2016 sebesar 102,43% dan paling rendah tahun 2017 sebesar -15,26% dengan rata-rata selama 5 tahun yaitu 95,53% .

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan maka penulis dapat memberikan saran :

1. Pemerintah Kabupaten Tegal diharapkan dapat lebih meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerahnya dengan meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang berpotensi menambah PAD, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan dalam penerimaan PAD sehingga dapat lebih mengoptimalkan potensi-potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan PAD sehingga mengurangi Ketergantungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi,
2. Pemerintah Kabupaten Tegal diharapkan dapat meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu dengan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Dengan begitu diharapkan penyusunan laporan keuangan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu sehingga memudahkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun anggaran berikutnya serta dapat menjadi informasi relevan bagi pemakainya,
3. Pemerintah Kabupaten Tegal diharapkan Penggunaan biaya untuk memungut PAD pada pemerintah Kabupaten Tegal sudah sangat efisien, maka anggaran biaya memungut PAD dapat dialihkan untuk anggaran kegiatan lain yang lebih bermanfaat untuk masyarakat,

4. Pemerintah Kabupaten Tegal diharapkan lebih seimbang dalam mengalokasikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan mengurangi biaya operasional dan meningkatkan belanja modal untuk meningkatkan pembangunan,
5. Pemerintah Kabupaten Tegal diharapkan Pertumbuhan PAD dan belanja modal harus selalu meningkatkan keberhasilan yang dicapai setiap tahun ke tahunnya karena untuk menggambarkan kinerja pemerintah yang baik,
6. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah rasio kemampuan membayar kembali pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio/DSCR*) sehingga analisis rasio keuangan lengkap, dimana dengan rasio DSCR kita dapat mengetahui pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain menggunakan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan alternatif dana sumber lain, yaitu dengan melakukan pinjaman sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Dwi Riris. 2015. "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah, Kemandirian Daerah dan Efektivitas Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2010-2014". Universitas Negeri Udayana. *Jurnal Akuntansi Unesa*. Vol. 4. No. 1. Juli 2015 hal: 1-17.
- Bisma, dan Susanto. 2010. "Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun Anggaran 2003-2007". *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Mataram*. Vol. 4, No. 3, Desember 2010 hal: 75-86.
- Damanhuri, Zulkifly Prabowo. 2013. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Di Jawa Timur Anggaran 2007-2011". Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
- Devi, Dian. K. 2016. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal". *Skripsi*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Faud, Muhammad Ramli. 2016. Analisis Laporan Keuangan Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ghozali, Imam dan Ratmono 2015. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2018. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Selemba Empat.
- Lazyra. 2016. "Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan". Fakultas Ekonomi. *Skripsi*. Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.
- Lubis, Putri Kemala D dan Nurlia Hafni. 2017. "Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011-2013". *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan*. Vol. 1, No. 1, Januari 2017 hal: 21-45.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

- Masita, et.al. 2014. "Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 14, No. 2, Mei 2014 hal: 1-13.
- Masumah, Anissatun. 2017. "Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2012-2015. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. *Skripsi*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Muthia, H. 2016. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014". Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. *Jurnal Vokasi Indonesia*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2016, pp. 105-121.
- Pelealu, Andreaz Marzel. 2013."Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012". *Jurnal EMBA*, ISSN 2303-1174, Vol.1 , No.4. Desember 2013 hal: 1189-1197.
- Pramono, Joko. 2014. "Analisa Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (studi kasus pada pemerintah daerah surakarta)". *Jurnal Among Makarti*. Vol. 7 No. 13. Juli 2014 hal: 83-112.
- Sayekti, Uyik Retnaning. 2016. "Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas, dan Efisiensi Terhadap (PAD) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011-2014". *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Bisnis*. Vol. 5. No. 2. Oktober 2016 Hal: 45-58.
- Suharmanto. 2018. Realisasi Fisik APBD Pemkab Tegal Baru Capai 21,79 persen. Online. <http://jateng.tribunnews.com/2018/06/03/realisasi-fisik-apbd-pemkab-tegal-baru-capai-2179-persen>. (15 Deseber 2018)
- Tegal, P. K, Peraturan Bupati Tegal No. 17 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Tegal, P. K, Peraturan Bupati Tegal No. 4 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
- Yasrie, Arfie. 2017. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014-2016". *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol. 1. No. 2. September 2017 hal : 67-81.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Audited)

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2014			REALISASI TA 2013
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	221.366.940.000,00	253.716.602.369,00	114,61	156.244.859.788,00
1.1.1	Pajak Daerah	53.156.822.000,00	52.480.614.287,00	98,73	48.221.943.060,00
1.1.2	Retribusi Daerah	38.294.691.000,00	40.008.906.697,00	104,48	24.410.427.074,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.344.949.000,00	7.817.034.818,00	106,43	4.946.668.663,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	122.570.478.000,00	153.410.046.567,00	125,16	78.665.820.991,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.484.349.108.000,00	1.484.366.472.437,00	100,00	1.353.487.528.720,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.164.963.849.000,00	1.142.422.935.437,00	98,07	1.071.845.030.550,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	28.870.809.000,00	27.545.375.109,00	95,41	34.281.092.615,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	7.019.300.000,00	7.019.427.328,00	100,00	7.462.723.935,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.044.211.310.000,00	1.044.211.310.000,00	100,00	957.576.304.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	84.862.430.000,00	63.646.823.000,00	75,00	72.524.910.000,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	237.902.077.000,00	237.902.077.000,00	100,00	205.339.080.000,00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	237.902.077.000,00	237.902.077.000,00	100,00	205.339.080.000,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	81.483.182.000,00	104.041.460.000,00	127,68	76.303.418.170,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	81.483.182.000,00	104.041.460.000,00	127,68	76.303.418.170,00
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	103.525.391.000,00	105.268.988.694,00	101,68	64.336.166.766,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.117.012.000,00	14.136.077.660,00	276,26	15.244.080,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	98.408.379.000,00	91.132.911.034,00	92,61	64.320.922.686,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.809.241.439.000,00	1.843.352.063.500,00	101,89	1.574.068.555.274,00

2	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERASI	1.612.795.975.000,00	1.485.997.755.304,00	92,14	1.313.098.040.071,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.073.519.562.000,00	1.033.550.952.354,00	96,28	905.180.311.926,00
2.1.2	Belanja Barang	431.672.899.000,00	353.501.994.415,00	81,89	304.570.711.513,00
2.1.3	Belanja Bunga	60.000.000,00	24.703.716,00	41,17	38.836.720,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	17.932.700.000,00	12.097.850.000,00	67,46	46.831.172.000,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	16.276.815.000,00	16.178.667.000,00	99,40	9.606.650.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	73.333.999.000,00	70.643.587.819,00	96,33	46.870.357.912,00
2.2	BELANJA MODAL	324.815.244.000,00	226.087.648.919,00	69,60	215.975.068.911,00
2.2.1	Belanja Tanah	5.337.900.000,00	4.274.645.829,00	80,08	7.716.462.440,00
2.2.2	Belanja Peralatan Mesin	68.278.174.783,00	55.445.453.886,00	81,21	47.710.241.045,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	94.814.847.100,00	64.795.673.418,00	68,34	54.101.345.465,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	147.078.829.717,00	98.694.619.786,00	67,10	104.613.431.311,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	9.305.492.400,00	2.877.256.000,00	30,92	1.833.588.650,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.349.154.000,00	2.797.742.000,00	44,06	2.789.314.100,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	6.349.154.000,00	2.797.742.000,00	44,06	2.789.314.100,00
2.4	TRANSFER				
2.4.1	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3	Bagi hasil Pendapatan lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.943.960.373.000,00	1.714.883.146.223,00	88,22	1.531.862.423.082,00
	SURPLUS / (DIFISIT)	(134.718.934.000,00)	128.468.917.277,00	(95,36)	42.206.132.192,00
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	151.023.662.000,00	151.023.662.966,00	100,00	106.100.928.110,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	21.000.000.000,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	142.960.000,00	80.287.428,00	56,16	105.235.864,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	151.166.622.000,00	151.103.950.394,00	99,96	127.206.163.974,00

3.2	PENGELUARAN DAERAH				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.079.000.000,00	16.079.000.000,00	100,00	11.270.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	368.688.000,00	118.633.200,00	32,18	118.633.200,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.447.688.000,00	16.197.633.200,00	98,48	18.388.633.200,00
	PEMBIAYAAN NETTO	134.718.934.000,00	134.906.317.194,00	100,14	108.817.530.774,00
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	263.375.234.471,00		151.023.662.966,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Slawi, Mei 2015

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PER 31 DESEMBER 2014 DAN TAHUN 2013
(Audited)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TAHUN 2014	TAHUN 2013
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	218.666.336.337,00	136.147.843.312,00
Kas di BLUD	36.136.239.750,00	14.875.271.918,00
Kas JKN	8.572.658.384,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.722.100,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	27.025.492,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak	36.818.793.203,00	6.946.261.910,00
Piutang Retribusi	14.251.897.742,00	1.562.192.106,00
Piutang Dana Perimbangan	0,00	0,00
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
Piutang Lainnya	11.605.310.003,00	11.711.154.181,00
Penyisihan Piutang lainnya	(11.605.310.003,00)	(11.711.154.181,00)
Persediaan	29.626.415.545,16	24.523.816.583,60
Jumlah Aset Lancar	344.072.340.961,16	184.084.133.421,60

INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Nonpermanen		
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Surat Utang Negara	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Investasi Non permanen Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Investasi Nonpermanen	0,00	0,00
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	97.986.995.532,94	70.123.765.413,45
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Investasi Permanen	97.986.995.532,94	70.123.765.413,45
Jumlah Investasi Jangka Panjang	97.986.995.532,94	70.123.765.413,45
ASET TETAP		
Tanah	227.036.141.431,00	222.761.495.602,00
Peralatan dan Mesin	378.625.932.906,48	322.799.685.548,00
Gedung dan Bangunan	702.451.017.267,00	648.095.300.363,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.101.515.782.461,00	1.009.368.824.073,00
Aset Tetap Lainnya	74.962.900.380,00	72.398.668.300,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	12.913.669.862,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap	2.497.505.444.307,48	2.275.423.973.886,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tuntutan Ganti Rugi	262.722.291,61	379.397.291,61
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	9.450.167.025,00	9.450.167.025,00
Aset Tak Berwujud	689.500.050,00	544.522.550,00
Aset lain-lain	355.440.756,00	355.440.756,00
Jumlah Aset Lainnya	10.757.830.122,61	10.729.527.622,61
JUMLAH ASET	2.950.322.610.924,19	2.540.361.400.343,66
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	1.174.364,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	129.203.912,50	59.316.600,03

Utang Jangka Pendek Lainnya	4.248.461.758,52	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	4.377.665.671,02	60.490.964,03
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	177.949.800,09
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank	0,00	0,00
Utang Dalam Negeri – Obligasi	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	177.949.800,09
JUMLAH KEWAJIBAN	4.377.665.671,02	238.440.764,12
EKUITAS DANA		
EKUITAS DANA LANCAR		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	263.375.234.471,00	151.023.662.966,00
Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00	27.025.492,00
Cadangan Piutang	51.070.690.945,00	8.508.454.016,00
Cadangan Persediaan	29.626.415.545,16	24.523.816.583,60
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(4.377.665.671,02)	(59.316.600,03)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	339.694.675.290,14	184.023.642.457,57
EKUITAS DANA INVESTASI		
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	97.986.995.532,94	70.123.765.413,45
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	2.497.505.444.307,48	2.275.423.973.886,00
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	10.757.830.122,61	10.729.527.622,61
Dana yang Harus Disediakan untk Pembayaran Utang Jangka Panjang	0,00	(177.949.800,09)
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	2.606.250.269.963,03	2.356.099.317.121,97

EKUITAS DANA CADANGAN		
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0,00	0,00
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS DANA	2.945.944.945.253,17	2.540.122.959.579,54
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.950.322.610.924,19	2.540.361.400.343,66

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Slawi, Mei 2015

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(Audited)

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2014	2013
I	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
I.1.	Arus Masuk Kas		
	Pendapatan Pajak Daerah	52.480.614.287,00	48.221.943.060,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	40.008.906.697,00	24.410.427.074,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.817.034.818,00	4.946.668.663,00
	Lain-lain PAD yang Sah	27.228.555.337,00	20.393.535.045,00
	Dana Bagi Hasil Pajak	27.545.375.109,00	34.281.092.615,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	7.019.427.328,00	7.462.723.935,00
	Dana Alokasi Umum	1.044.211.310.000,00	957.576.304.000,00
	Dana Alokasi Khusus	63.646.823.000,00	72.524.910.000,00
	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
	Dana Penyesuaian	237.902.077.000,00	205.339.080.000,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	104.041.460.000,00	76.303.418.170,00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
	Pendapatan Hibah	14.136.077.660,00	15.244.080,00
	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00
	Pendapatan Lainnya	91.132.911.034,00	64.320.922.686,00
	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	1.717.170.572.270,00	1.515.796.269.328,00
I.2.	Arus Keluar Kas		
	Belanja Pegawai	1.015.228.622.085,00	902.820.833.193,00
	Belanja Barang	284.824.307.701,00	254.008.900.553,00
	Bunga	24.703.716,00	38.836.720,00
	Subsidi	0,00	0,00
	Hibah	12.097.850.000,00	46.831.172.000,00
	Bantuan Sosial	16.178.667.000,00	9.606.650.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan	70.643.587.819,00	46.870.357.912,00
	Belanja Tak Terduga	2.797.742.000,00	2.789.314.100,00
	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>	1.401.795.480.321,00	1.262.966.064.478,00
	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>	315.375.091.949,00	252.830.204.850,00
II	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		

II.1.	Arus Masuk Kas		
	Pendapatan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
II.2.	Arus Keluar Kas		
	Belanja Tanah	4.274.645.829,00	7.716.462.440,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	46.097.605.855,00	38.872.867.398,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	64.795.673.418,00	54.101.345.465,00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	98.694.619.786,00	104.613.431.311,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.877.256.000,00	1.833.588.650,00
	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	216.739.800.888,00	207.137.695.264,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(216.739.800.888,00)	(207.137.695.264,00)
III	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
III.1.	Arus Masuk Kas		
	Pencairan Dana Cadangan	0,00	21.000.000.000,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman Perguliran Modal	80.287.428,00	105.235.864,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	80.287.428,00	21.105.235.864,00
III.2.	Arus Keluar Kas		
	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	7.000.000.000,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	16.079.000.000,00	11.270.000.000,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	118.633.200,00	118.633.200,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	16.197.633.200,00	18.388.633.200,00
	Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Pembiayaan	(16.117.345.772,00)	2.716.602.664,00
IV	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
IV.1.	Arus Masuk Kas		
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga		
	~ Iuran wajib Pegawai	51.128.708.382,00	48.780.149.483,00
	~ Tabungan Uang Muka Perumahan	1.099.815.000,00	1.118.535.000,00
	~ Subsidi Askes	15.357.331.989,00	9.768.205.639,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan	13.114.446.198,00	11.676.621.288,00
	~ Pajak PPn	0,00	0,00
	~ Penerimaan kiriman uang (R/K SKPD)	547.736,00	503.140,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	80.700.849.305,00	71.344.014.550,00

IV.2.	Arus Keluar Kas		
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		
	~ Iuran wajib Pegawai	51.128.708.382,00	48.780.149.483,00
	~ Tabungan Uang Muka Perumahan	1.099.815.000,00	1.118.535.000,00
	~ Subsidi Askes	15.357.331.989,00	9.768.205.639,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan	13.114.446.198,00	11.676.621.288,00
	~ Pengeluaran kiriman uang (R/K SKPD)	0,00	547.736,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	80.700.301.569,00	71.344.059.146,00
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran	547.736,00	(44.596,00)
	KENAIKAN / (PENURUNAN KAS)	82.518.493.025,00	48.409.067.654,00
	Saldo Awal Kas di BUD	136.147.843.312,00	87.738.775.658,00
	Saldo Akhir Kas di BUD	218.666.336.337,00	136.147.843.312,00
	Saldo Akhir Kas di BLUD	36.136.239.750,00	14.875.271.918,00
	Saldo Akhir Kas JKN	8.572.658.384,00	0,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.722.100,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	27.025.492,00
	Saldo Akhir Kas	263.375.234.471,00	151.051.862.822,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Slawi, Mei 2015

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Tambahan Penghasilan:		TA 2014		TA 2013
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	32.400.000.000,00	29.955.622.475,00	26.120.420.000,00
2	Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas	65.310.000,00	65.304.000,00	97.254.000
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	44.400.000,00	44.400.000,00	190.348.246.675,00
4	Tunjangan Profesi Guru PNSD	260.567.697.360,00	257.847.435.539,00	-
5	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	3.836.752.000,00	2.351.437.500,00	-
Jumlah		296.914.159.360,00	290.264.199.514,00	216.565.920.675,00

c. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

Realisasi belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2014 sebesar Rp4.380.000.000,00 dan TA 2013 sebesar Rp4.260.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Biaya Pemungutan Pajak

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH		TA 2014		TA 2013
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Penunjang Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00	3.780.000.000,00	3.729.600.000,00
2	Belanja Tunjangan Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	531.100.000,00
Jumlah		4.380.000.000,00	4.380.000.000,00	4.260.700.000,00

Realisasi Biaya Pemungutan Pajak TA 2014 sebesar Rp420.063.676,00 dan TA 2013 sebesar Rp1.800.896.582,00.

b. Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Realisasi Insentif Pemungutan Pajak Daerah TA 2014 sebesar Rp2.398.614.951,00 dan TA 2013 sebesar Rp1.758.998.348,00.

c. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Realisasi Insentif Pemungutan Retribusi Daerah TA 2014 Rp661.368.364,00 dan TA 2013 sebesar Rp520.818.146,00.

1) Belanja Pegawai – Langsung

Realisasi belanja pegawai langsung TA 2014 sebesar Rp60.549.799.191,00 dan TA 2013 sebesar Rp37.207.592.318,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Pegawai –Langsung		TA 2014		TA 2013
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a.	Honorarium PNS	14.679.350.165,00	12.518.781.850,00	12.786.045.750,00
b.	Honorarium Non PNS	18.787.318.243,00	15.891.700.510,00	15.300.358.669,00
c.	Uang Lembur	2.819.031.536,00	2.270.782.100,00	1.984.809.850,00
d.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	126.275.000,00	122.525.000,00	573.535.000,00
e.	Belanja BLUD	3.854.915.000,00	3.210.395.920,00	2.359.478.733,00
f.	Belanja Jasa Pelayanan Medik	29.515.833.556,00	26.059.049.811,00	3.438.805.316,00
g.	Uang Makan Piket/Kehadiran Siaga	627.410.500,00	476.564.000,00	764.559.000,00
Jumlah		70.410.134.000,00	60.549.799.191,00	37.207.592.318,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Audited)

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Reff CaLK	TAHUN ANGGARAN 2015			REALISASI TA 2014
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN - LRA	5.1.1				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA	5.1.1.a	280.411.781.000,00	304.000.970.135,00	108,41	253.716.602.369,00
4.1.1	Pajak Daerah - LRA	5.1.1.a.1	65.256.000.000,00	64.737.082.699,00	99,20	52.480.614.287,00
4.1.2	Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.a.2	19.772.202.000,00	18.220.835.174,00	92,15	40.008.906.697,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.a.3	9.124.072.000,00	9.236.793.181,00	101,24	7.817.034.818,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA	5.1.1.a.4	186.259.507.000,00	211.806.259.081,00	113,72	153.410.046.567,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	5.1.1.b	1.801.629.341.000,00	1.787.067.853.123,00	99,19	1.575.499.383.471,00
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA	5.1.1.b.1	1.213.149.797.000,00	1.186.593.271.696,00	97,81	1.142.422.935.437,00
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.b.1.1	40.170.530.000,00	31.353.191.350,00	78,05	27.545.375.109,00
4.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) - LRA	5.1.1.b.1.2	1.818.404.000,00	1.201.531.346,00	66,08	7.019.427.328,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum - LRA	5.1.1.b.1.3	1.085.549.293.000,00	1.085.549.293.000,00	100,00	1.044.211.310.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus - LRA	5.1.1.b.1.4	85.611.570.000,00	68.489.256.000,00	80,00	63.646.823.000,00
4.2.2	Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	5.1.1.b.2	431.800.140.000,00	432.507.640.000,00	100,16	237.902.077.000,00
4.2.2.1	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.2	Dana Keistimewaan - LRA					
4.2.2.3	Dana Penyesuaian		431.800.140.000,00	432.507.640.000,00	100,16	237.902.077.000,00
4.2.3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	5.1.1.b.3	106.895.678.000,00	140.539.246.005,00	131,47	104.041.460.000,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.b.3.1	106.895.678.000,00	140.539.246.005,00	131,47	104.041.460.000,00
4.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.3	Dana Otonomi Khusus - LRA		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	5.1.1.b.4	49.783.726.000,00	27.427.695.422,00	55,09	91.132.911.034,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA		49.783.726.000,00	27.427.695.422,00	55,09	91.132.911.034,00

4.2.4.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA		0,00	0,00		0,00
4.2.4.3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA		0,00	0,00		0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LRA	5.1.1.c	6.117.012.000,00	6.026.800.725,00	98,53	14.136.077.660,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA		6.117.012.000,00	6.026.800.725,00	98,53	14.136.077.660,00
4.3.2	Pendapatan Dana Darurat - LRA		0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Pendapatan Lainnya - LRA		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN		2.088.158.134.000,00	2.097.095.623.983,00	100,43	1.843.352.063.500,00
5	BELANJA	5.1.2	2.132.355.466.000,00	1.729.676.021.287,00	81,12	1.644.239.558.404,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.a	1.709.441.201.000,00	1.472.162.882.985,00	86,12	1.415.354.167.485,00
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.a.1	1.181.340.876.050,00	1.065.429.884.593,00	90,19	987.790.717.113,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.a.2	396.336.670.546,00	333.743.691.047,00	84,21	278.429.349.203,00
5.1.3	Belanja Bunga	5.1.2.a.3	60.000.000,00	10.570.714,00	17,62	24.703.716,00
5.1.4	Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.a.4	108.077.254.404,00	50.433.376.631,00	46,66	132.930.730.453,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.a.5	23.626.400.000,00	22.545.360.000,00	95,42	16.178.667.000,00
5.2	BELANJA MODAL	5.1.2.b	418.914.265.000,00	255.207.688.302,00	60,92	226.087.648.919,00
5.2.1	Belanja Tanah		14.748.352.000,00	9.604.822.484,00	65,12	4.274.645.829,00
5.2.2	Belanja Peralatan Mesin		105.122.078.778,00	84.999.197.448,00	80,86	55.445.453.886,00
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan		134.576.096.322,00	91.885.644.369,00	68,28	64.795.673.418,00
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		157.939.165.400,00	63.675.855.489,00	40,32	98.694.619.786,00
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya		6.528.572.500,00	5.042.168.512,00	77,23	2.877.256.000,00
5.2.6	Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.c	4.000.000.000,00	2.305.450.000,00	57,64	2.797.742.000,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga		4.000.000.000,00	2.305.450.000,00	57,64	2.797.742.000,00
6	TRANSFER	5.1.3	205.309.214.000,00	204.621.094.371,00	99,66	70.643.587.819,00
6.1	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	5.1.3.a	8.241.333.000,00	7.736.422.556,00	93,87	0,00
6.1.1	Bagi Hasil Pajak		6.352.932.800,00	5.875.620.126,00	92,49	0,00
6.1.2	Bagi hasil Pendapatan lainnya		1.888.400.200,00	1.860.802.430,00	98,54	0,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.b	197.067.881.000,00	196.884.671.815,00	99,91	70.643.587.819,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		195.998.977.000,00	195.998.976.991,00	100,00	69.823.599.919,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		1.068.904.000,00	885.694.824,00	82,86	819.987.900,00
	SURPLUS / (DIFISIT)		(249.506.546.000,00)	162.798.508.325,00	(65,25)	128.468.917.277,00
7	PEMBIAYAAN	5.1.4				
7.1	PENERIMAAN DAERAH	5.1.4.a				
7.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)		263.375.234.000,00	263.255.866.829,00	99,95	151.023.662.966,00

7.1.2	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.5	Penerimaan Kembali Piutang		0,00	192.807.336,00	0,00	80.287.428,00
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH		263.375.234.000,00	263.448.674.165,00	100,03	151.103.950.394,00
7.2	PENGELUARAN DAERAH	5.1.4.b				
7.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	100,00	16.079.000.000,00
7.2.3	Pembayaran Pokok Utang		368.688.000,00	118.633.202,00	32,18	118.633.200,00
7.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		13.868.688.000,00	13.618.633.202,00	98,20	16.197.633.200,00
	PEMBIAYAAN NETTO		249.506.546.000,00	249.830.040.963,00	100,13	134.906.317.194,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	5.2.3	0,00	412.628.549.288,00		263.375.234.471,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Slawi, Mei 2016

BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PER 31 DESEMBER 2015 DAN TAHUN 2014
(Audited)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Reff. CaLK	TAHUN 2015	TAHUN 2014
ASET	5.5.1		
ASET LANCAR	5.5.1.1		
Kas di Kas Daerah	5.5.1.1.1	176.541.187.247,00	218.666.336.337,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.1.1.2	50.343.790,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.1.1.3	0,00	0,00
Kas di BLUD	5.5.1.1.4	53.092.218.534,00	36.136.239.750,00
Kas JKN	5.5.1.1.5	0,00	8.572.658.384,00
Setara Kas	5.5.1.1.6	183.000.000.000,00	
Investasi Jangka Pendek	5.5.1.1.7	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	5.5.1.1.8	55.577.877.215,00	51.070.690.945,00
Piutang Lainnya	5.5.1.1.9	11.842.617.959,00	11.605.310.003,00
Penyisihan Piutang	5.5.1.1.10	(38.595.301.937,05)	(38.604.466.519,00)
Beban Dibayar Dimuka	5.5.1.1.11	5.701.015,00	-
Persediaan	5.5.1.1.12	79.649.080.461,89	29.626.415.545,16
Jumlah Aset Lancar		521.163.724.284,84	317.073.184.445,16
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Nonpermanen			
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Dana Bergulir		0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang		0,00	0,00
Investasi Non permanen Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Investasi Nonpermanen		0,00	0,00

Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.1.2	120.021.873.907,50	97.986.995.532,94
Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Investasi Permanen		120.021.873.907,50	97.986.995.532,94
Jumlah Investasi Jangka Panjang		120.021.873.907,50	97.986.995.532,94
ASET TETAP			
Tanah	5.5.1.3.a	236.444.026.117,00	227.036.141.431,00
Peralatan dan Mesin	5.5.1.3.b	479.229.426.403,89	378.625.932.906,48
Gedung dan Bangunan	5.5.1.3.c	838.885.381.224,00	702.451.017.267,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.1.3.d	1.183.776.265.374,00	1.101.515.782.461,00
Aset Tetap Lainnya	5.5.1.3.e	76.664.032.277,00	74.962.900.380,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.5.1.3.f	6.428.579.438,00	12.913.669.862,00
Akumulasi Penyusutan	5.5.1.3.g	(1.214.950.835.532,00)	(1.085.379.428.156,00)
Jumlah Aset Tetap		1.606.476.875.301,89	1.412.126.016.151,48
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan		0,00	0,00
ASET LAINNYA			
Tuntutan Ganti Rugi	5.5.1.4.a	394.647.291,61	262.722.291,61
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.5.1.4.b	9.450.167.025,00	9.450.167.025,00
Aset Tak Berwujud	5.5.1.4.c	394.182.576,46	138.628.947,92
Aset lain-lain	5.5.1.4.d	355.440.756,00	355.440.756,00
Jumlah Aset Lainnya		10.594.437.649,07	10.206.959.020,53
JUMLAH ASET		2.258.256.911.143,30	1.837.393.155.150,11
KEWAJIBAN	-		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.2.1	55.200.283,00	0,00
Utang Bunga	5.5.2.2	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	129.203.912,50
Pendapatan Diterima Dimuka	5.5.2.3	1.737.383.684,00	1.501.158.903,00
Utang Beban	5.5.2.4	29.144.471.103,00	2.524.772.379,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.2.5	41.119.270.636,00	4.248.461.758,52
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		72.056.325.706,00	8.403.596.953,02
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang				0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN				72.056.325.706,00	8.403.596.953,02
EKUITAS					
EKUITAS			5.5.3	2.186.200.585.437,30	1.828.989.558.197,09
Jumlah EKUITAS				2.186.200.585.437,30	1.828.989.558.197,09
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS				2.258.256.911.143,30	1.837.393.155.150,11

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Slawi, Mei 2016

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Audited)

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Reff CaLK	2015	2014
I	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.6.1		
I.1.	Arus Masuk Kas			
	Pendapatan Pajak Daerah		64.737.082.699,00	52.480.614.287,00
	Pendapatan Retribusi Daerah		18.220.835.174,00	40.008.906.697,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		9.236.793.181,00	7.817.034.818,00
	Lain-lain PAD yang Sah		38.249.147.741,00	27.228.555.337,00
	Dana Bagi Hasil Pajak		31.353.191.350,00	27.545.375.109,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		1.201.531.346,00	7.019.427.328,00
	Dana Alokasi Umum		1.085.549.293.000,00	1.044.211.310.000,00
	Dana Alokasi Khusus		68.489.256.000,00	63.646.823.000,00
	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
	Dana Penyesuaian		432.507.640.000,00	237.902.077.000,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		140.539.246.005,00	104.041.460.000,00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
	Bantuan Keuangan dari pemerintah Daerah Provinsi lainnya		27.427.695.422,00	0,00
	Pendapatan Hibah		6.026.800.725,00	14.136.077.660,00
	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00
	Pendapatan Lainnya		0,00	91.132.911.034,00
	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		1.923.538.512.643,00	1.717.170.572.270,00
I.2.	Arus Keluar Kas			
	Belanja Pegawai		1.065.429.884.593,00	987.790.717.113,00
	Belanja Barang		247.762.408.322,00	312.262.212.673,00
	Bunga		10.570.714,00	24.703.716,00
	Subsidi		0,00	0,00
	Hibah		6.330.991.077,00	12.097.850.000,00
	Bantuan Sosial		22.545.360.000,00	16.178.667.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan		196.884.671.815,00	70.643.587.819,00
	Belanja Tak Terduga		2.305.450.000,00	2.797.742.000,00
	Bagi Hasil Pajak		5.875.620.126,00	0,00
	Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		1.860.802.430,00	0,00

	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		1.549.005.759.077,00	1.401.795.480.321,00
	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>		374.532.753.566,00	315.375.091.949,00
II	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.6.2		
II.1.	Arus Masuk Kas			
	Pendapatan Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap		0,00	0,00
	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
	<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		0,00	0,00
II.2.	Arus Keluar Kas			
	Belanja Tanah		9.604.822.484,00	4.274.645.829,00
	Belanja Peralatan dan Mesin		53.224.234.629,00	46.097.605.855,00
	Belanja Gedung dan Bangunan		88.642.312.669,00	64.795.673.418,00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		63.669.490.489,00	98.694.619.786,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya		5.033.170.512,00	2.877.256.000,00
	Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00
	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		220.174.030.783,00	216.739.800.888,00
	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan</i>		(220.174.030.783,00)	(216.739.800.888,00)
III	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.6.3		
III.1.	Arus Masuk Kas			
	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman Perguliran Modal		192.807.336,00	80.287.428,00
	<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		192.807.336,00	80.287.428,00
III.2.	Arus Keluar Kas			
	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		13.500.000.000,00	16.079.000.000,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		118.633.202,00	118.633.200,00
	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		13.618.633.202,00	16.197.633.200,00
	<i>Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Pembiayaan</i>		(13.425.825.866,00)	(16.117.345.772,00)
IV	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	5.6.4		
IV.1.	Arus Masuk Kas			
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga			
	~ Iuran wajib Pegawai		54.800.220.377,00	51.128.708.382,00
	~ Tabungan Uang Muka Perumahan		1.105.269.000,00	1.099.815.000,00

	~ Subsidi Askes		16.514.286.102,00	15.357.331.989,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan		50.427.891.205,00	13.114.446.198,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 22		1.454.477.370,00	0,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 23		3.741.527.493,00	0,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 25		6.082.030,00	0,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 4 (2)		305.240.251,00	0,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 26		18.776.500,00	0,00
	~ Pajak PPn		27.032.735.147,00	0,00
	~ BPJS Ketenagakerjaan		2.192.728.024,00	
	~ Penerimaan kiriman uang (R/K SKPD)		0,00	547.736,00
	<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		157.599.233.499,00	80.700.849.305,00
IV.2.	Arus Keluar Kas			
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga			
	~ Iuran wajib Pegawai		54.800.180.377,00	51.128.708.382,00
	~ Tabungan Uang Muka Perumahan		1.105.269.000,00	1.099.815.000,00
	~ Subsidi Askes		16.514.286.102,00	15.357.331.989,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan		50.426.631.958,00	13.114.446.198,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 22		1.454.284.347,00	0,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 23		3.737.791.148,00	0,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 25		6.082.030,00	0,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 4 (2)		305.240.251,00	0,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 26		18.776.500,00	0,00
	~ Pajak PPn		27.012.766.602,00	0,00
	~ BPJS Ketenagakerjaan		2.191.754.901,00	0,00
	~ Pengeluaran kiriman uang (R/K SKPD)		84.216.290,00	0,00
	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		157.657.279.506,00	80.700.301.569,00
	<i>Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Non Anggaran</i>		(58.046.007,00)	547.736,00
	KENAIKAN / (PENURUNAN KAS)		140.874.850.910,00	82.518.493.025,00

	Saldo Awal Kas di BUD		218.666.336.337,00	136.147.843.312,00
	Saldo Akhir Kas di BUD		359.541.187.247,00	218.666.336.337,00
	Saldo Akhir Kas di BLUD		53.092.218.534,00	36.136.239.750,00
	Saldo Akhir Kas JKN		0,00	8.572.658.384,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		50.343.790,00	0,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
	Saldo Akhir Kas		412.683.749.571,00	263.375.234.471,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Slawi, Mei 2016

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH		TA 2015		TA 2014
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Belanja Penunjang Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00	3.761.100.000,00	3.780.000.000,00
2	Belanja Tunjangan Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
Jumlah		4.380.000.000,00	4.361.100.000,00	4.380.000.000,00

- a. Biaya Pemungutan Pajak
 Realisasi Biaya Pemungutan Pajak TA 2015 sebesar Rp438.444.883,00 dan TA 2014 sebesar Rp420.063.676,00.
 - b. Insentif Pemungutan Pajak Daerah
 Realisasi Insentif Pemungutan Pajak Daerah TA 2015 sebesar Rp2.639.126.411,00 dan TA 2014 sebesar Rp2.398.614.951,00.
 - c. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
 Realisasi Insentif Pemungutan Retribusi Daerah TA 2015 Rp556.826.804,00 dan TA 2014 sebesar Rp661.368.364,00.
- 2) Belanja Pegawai – Langsung
 Realisasi belanja pegawai langsung TA 2015 sebesar Rp20.767.124.844,00 dan TA 2014 sebesar Rp14.789.563.950,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Pegawai –Langsung		TA 2015		TA 2014
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
a.	Uang Lembur	2.725.274.500,00	2.236.021.000,00	2.270.782.100,00
b.	Honorarium PNS	22.318.045.550,00	18.531.103.844,00	12.518.781.850,00
Jumlah		25.043.320.050,00	20.767.124.844,00	14.789.563.950,00

Rincian Belanja Pegawai Langsung diatas adalah sebagai berikut:

- a. Uang Lembur Realisasi Uang Lembur TA 2015 sebesarRp2.236.021.000,00 dan TA 2014 sebesar Rp2.270.782.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uang lembur		TA 2015		TA 2014
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Uang Lembur PNS	2.386.461.000,00	1.961.390.500,00	2.016.621.300,00
2.	Uang Lembur Non PNS	338.813.500,00	274.630.500,00	254.160.800,00
Jumlah		2.725.274.500,00	2.236.021.000,00	2.270.782.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Audited)

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Reff CaLK	TAHUN ANGGARAN 2016			REALISASI TA 2015
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN - LRA	5.1.1				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH – LRA	5.1.1.a	312.688.892.000,00	316.051.189.733,60	101,08	304.000.970.135,00
4.1.1	Pajak Daerah - LRA	5.1.1.a.1	70.025.000.000,00	69.810.605.561,00	99,69	64.737.082.699,00
4.1.2	Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.a.2	22.718.154.000,00	21.313.939.246,00	93,82	18.220.835.174,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.a.3	9.511.567.000,00	11.403.678.765,00	119,89	9.236.793.181,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA	5.1.1.a.4	210.434.171.000,00	213.522.966.161,60	101,47	211.806.259.081,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER – LRA	5.1.1.b	2.026.686.299.000,00	1.835.602.482.074,00	90,57	1.787.067.853.123,00
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA	5.1.1.b.1	1.674.614.978.000,00	1.493.483.951.400,00	89,18	1.186.593.271.696,00
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.b.1.1	30.827.205.000,00	32.837.994.113,00	106,52	31.353.191.350,00
4.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) – LRA	5.1.1.b.1.2	8.420.760.000,00	7.954.565.304,00	94,46	1.201.531.346,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum – LRA	5.1.1.b.1.3	1.162.102.111.000,00	1.162.102.111.000,00	100,00	1.085.549.293.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus – LRA	5.1.1.b.1.4	473.264.902.000,00	290.589.280.983,00	61,40	68.489.256.000,00
4.2.2	Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	5.1.1.b.2	183.211.736.000,00	183.211.736.000,00	100,00	432.507.640.000,00
4.2.2.1	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.2	Dana Keistimewaan – LRA					
4.2.2.3	Dana Penyesuaian		183.211.736.000,00	183.211.736.000,00	100,00	432.507.640.000,00
4.2.3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	5.1.1.b.3	141.902.328.000,00	138.509.897.674,00	97,61	140.539.246.005,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	5.1.1.b.3.1	141.902.328.000,00	138.509.897.674,00	97,61	140.539.246.005,00
4.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.3	Dana Otonomi Khusus - LRA		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	Bantuan Keuangan – LRA	5.1.1.b.4	26.957.257.000,00	20.396.897.000,00	75,66	27.427.695.422,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi		26.957.257.000,00	20.396.897.000,00	75,66	27.427.695.422,00

	Lainnya – LRA					
4.2.4.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten – LRA		0,00	0,00		0,00
4.2.4.3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA		0,00	0,00		0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH – LRA	5.1.1.c	9.117.012.000,00	9.507.387.780,00	104,28	6.026.800.725,00
4.3.1	Pendapatan Hibah – LRA		9.117.012.000,00	9.507.387.780,00	104,28	6.026.800.725,00
4.3.2	Pendapatan Dana Darurat - LRA		0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Pendapatan Lainnya – LRA		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN		2.348.492.203.000,00	2.161.161.059.587,60	92,02	2.097.095.623.983,00
5	BELANJA	5.1.2	2.373.791.649.000,00	2.070.201.492.705,00	87,21	1.729.676.021.287,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.a	1.709.314.905.000,00	1.546.321.787.664,00	90,46	1.472.162.882.985,00
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.a.1	1.207.332.382.700,00	1.108.043.062.768,00	91,78	1.065.429.884.593,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.a.2	429.879.434.930,00	373.404.099.120,00	86,86	333.743.691.047,00
5.1.3	Belanja Bunga	5.1.2.a.3	60.000.000,00	0,00	0,00	10.570.714,00
5.1.4	Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.a.4	55.971.087.370,00	49.006.197.776,00	87,56	50.433.376.631,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.a.5	16.072.000.000,00	15.868.428.000,00	98,73	22.545.360.000,00
5.2	BELANJA MODAL	5.1.2.b	656.617.581.000,00	516.642.310.814,00	78,68	255.207.688.302,00
5.2.1	Belanja Tanah		9.350.000.000,00	8.356.107.531,00	89,37	9.604.822.484,00
5.2.2	Belanja Peralatan Mesin		77.521.975.900,00	71.089.912.876,00	91,70	84.999.197.448,00
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan		166.085.926.100,00	118.017.149.842,00	71,06	91.885.644.369,00
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		395.383.411.000,00	311.792.586.911,00	78,86	63.675.855.489,00
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya		8.276.268.000,00	7.386.553.654,00	89,25	5.042.168.512,00
5.2.6	Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.c	7.859.163.000,00	7.237.394.227,00	92,09	2.305.450.000,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga		7.859.163.000,00	7.237.394.227,00	92,09	2.305.450.000,00
6	TRANSFER	5.1.3	354.399.415.000,00	351.927.031.374,00	99,30	204.621.094.371,00
6.1	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	5.1.3.a	8.948.870.000,00	8.906.448.453,00	99,53	7.736.422.556,00
6.1.1	Bagi Hasil Pajak		6.902.500.000,00	6.874.031.611,00	99,59	5.875.620.126,00
6.1.2	Bagi hasil Pendapatan lainnya		2.046.370.000,00	2.032.416.842,00	99,32	1.860.802.430,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.b	345.450.545.000,00	343.020.582.921,00	99,30	196.884.671.815,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		344.381.641.000,00	342.020.840.961,00	99,31	195.998.976.991,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		1.068.904.000,00	999.741.960,00	93,53	885.694.824,00
	SURPLUS / (DIFISIT)		(379.698.861.000,00)	(260.967.464.491,40)	68,73	162.798.508.325,00
7	PEMBIAYAAN	5.1.4				
7.1	PENERIMAAN DAERAH	5.1.4.a				
7.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)		412.628.549.000,00	412.628.549.288,00	100,00	263.255.866.829,00

7.1.2	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.5	Penerimaan Kembali Piutang		0,00	570.115.456,00	0,00	192.807.336,00
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH		412.628.549.000,00	413.198.664.744,00	100,14	263.448.674.165,00
7.2	PENGELUARAN DAERAH	5.1.4.b				
7.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	0,00	0,00
7.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		16.561.000.000,00	16.561.000.000,00	100,00	13.500.000.000,00
7.2.3	Pembayaran Pokok Utang		368.688.000,00	-	-	118.633.202,00
7.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		32.929.688.000,00	32.561.000.000,00	98,88	13.618.633.202,00
	PEMBIAYAAN NETTO		379.698.861.000,00	380.637.664.744,00	100,25	249.830.040.963,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	5.2.3	0,00	119.670.200.252,60		412.628.549.288,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Slawi, Mei 2017
BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 9 Tahun 2017
 TANGGAL : 21 Agustus 2017

NERACA
 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
 PER 31 DESEMBER 2016 DAN TAHUN 2015
 (Audited)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Reff. CaLK	TAHUN 2016	TAHUN 2015
ASET	5.4.1		
ASET LANCAR	5.5.1.1		
Kas di Kas Daerah	5.5.1.1.1	86.150.190.721,00	176.541.187.247,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.1.1.2	-	50.343.790,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.1.1.3	-	-
Kas di BLUD	5.5.1.1.4	33.549.009.531,60	53.092.218.534,00
Kas JKN	5.5.1.1.5	-	-
Kas Lainnya	5.5.1.1.6	9.775.511.701,83	
Setara Kas	5.5.1.1.7	-	183.000.000.000,00
Investasi Jangka Pendek	5.5.1.1.8	-	-
Piutang Pendapatan	5.5.1.1.9	67.063.815.524,00	55.577.877.215,00
Piutang Lainnya	5.5.1.1.10	11.253.891.801,00	11.842.617.959,00
Penyisihan Piutang	5.5.1.1.11	(40.792.138.605,91)	(38.595.301.937,05)
Beban Dibayar Dimuka	5.5.1.1.12	-	5.701.015,00
Persediaan	5.5.1.1.13	28.099.549.296,02	79.649.080.461,89
Jumlah Aset Lancar		195.099.829.969,54	521.163.724.284,84
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Nonpermanen			
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		-	-
Investasi dalam Obligasi		-	-
Investasi dalam Proyek Pembangunan		-	-
Dana Bergulir		-	-
Deposito Jangka Panjang		-	-
Investasi Non permanen Lainnya		-	-
Jumlah Investasi Nonpermanen		-	-
Investasi Permanen			

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.1.2	148.021.722.955,12	120.021.873.907,50
Investasi Permanen Lainnya		-	-
Jumlah Investasi Permanen		148.021.722.955,12	120.021.873.907,50
Jumlah Investasi Jangka Panjang		148.021.722.955,12	120.021.873.907,50
ASET TETAP			
Tanah	5.5.1.3.a	637.353.841.778,00	236.444.026.117,00
Peralatan dan Mesin	5.5.1.3.b	546.484.854.131,10	479.229.426.403,89
Gedung dan Bangunan	5.5.1.3.c	946.556.922.025,00	838.885.381.224,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.1.3.d	1.460.850.835.723,00	1.183.776.265.374,00
Aset Tetap Lainnya	5.5.1.3.e	92.205.365.867,99	76.664.032.277,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.5.1.3.f	7.254.197.137,00	6.428.579.438,00
Akumulasi Penyusutan	5.5.1.3.g	(1.325.849.891.290,27)	(1.214.950.835.532,00)
Jumlah Aset Tetap		2.364.856.125.371,82	1.606.476.875.301,89
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		16.486.246.571,00	-
Jumlah Dana Cadangan		16.486.246.571,00	-
ASET LAINNYA			
Tuntutan Ganti Rugi	5.5.1.4.a	336.147.291,61	394.647.291,61
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.5.1.4.b	9.450.167.025,00	9.450.167.025,00
Aset Tak Berwujud	5.5.1.4.c	1.925.494.240,00	1.130.170.128,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.5.1.4.c	(886.105.385,87)	(735.987.551,54)
Aset lain-lain	5.5.1.4.d	59.914.947.974,36	355.440.756,00
Jumlah Aset Lainnya		70.740.651.145,10	10.594.437.649,07
JUMLAH ASET		2.795.204.576.012,58	2.258.256.911.143,30
KEWAJIBAN	-		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.2.1	34.072.978,00	55.200.283,00
Utang Bunga	5.5.2.2	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	5.5.2.3	2.518.231.585,00	1.737.383.684,00
Utang Beban	5.5.2.4	18.617.048.014,99	29.144.471.103,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.2.5	24.195.762.571,00	41.119.270.636,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		45.365.115.148,99	72.056.325.706,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri		-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		45.365.115.148,99	72.056.325.706,00
EKUITAS			

EKUITAS	5.5.3	2.749.839.460.863,59	2.186.200.585.437,30
Jumlah EKUITAS		2.749.839.460.863,59	2.186.200.585.437,30
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.795.204.576.012,58	2.258.256.911.143,30

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN VI: PERATURAN DAERAH
NOMOR : 9 Tahun 2017
TANGGAL : 21 Agustus 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Audited)

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Reff CaLK	2016	2015
I	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
I.1.	Arus Masuk Kas			
	Pendapatan Pajak Daerah		69.810.605.561,00	64.737.082.699,00
	Pendapatan Retribusi Daerah		21.313.939.246,00	18.220.835.174,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		11.403.678.765,00	9.236.793.181,00
	Lain-lain PAD yang Sah		34.600.657.350,00	38.249.147.741,00
	Dana Bagi Hasil Pajak		32.837.994.113,00	31.353.191.350,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		7.954.565.304,00	1.201.531.346,00
	Dana Alokasi Umum		1.162.102.111.000,00	1.085.549.293.000,00
	Dana Alokasi Khusus		290.589.280.983,00	68.489.256.000,00
	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
	Dana Penyesuaian		183.211.736.000,00	432.507.640.000,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		138.509.897.674,00	140.539.246.005,00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
	Bantuan Keuangan dari pemerintah Daerah Provinsi lainnya		20.396.897.000,00	27.427.695.422,00
	Pendapatan Hibah		9.507.387.780,00	6.026.800.725,00
	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00
	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		1.982.238.750.776,00	1.923.538.512.643,00
I.2.	Arus Keluar Kas			
	Belanja Pegawai		1.108.043.062.768,00	1.065.429.884.593,00
	Belanja Barang		219.507.168.669,00	247.762.408.322,00
	Bunga		0,00	10.570.714,00
	Subsidi		0,00	0,00
	Hibah		49.006.197.776,00	6.330.991.077,00
	Bantuan Sosial		15.868.428.000,00	22.545.360.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan		343.020.582.921,00	196.884.671.815,00
	Belanja Tak Terduga		7.237.394.227,00	2.305.450.000,00
	Bagi Hasil Pajak		6.874.031.611,00	5.875.620.126,00

	Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		2.032.416.842,00	1.860.802.430,00
	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		1.751.589.282.814,00	1.549.005.759.077,00
	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>		230.649.467.962,00	374.532.753.566,00
II	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.5.2		
II.1.	Arus Masuk Kas			
	Pendapatan Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap		0,00	0,00
	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
	<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		0,00	0,00
II.2.	Arus Keluar Kas			
	Belanja Tanah		8.356.107.531,00	9.604.822.484,00
	Belanja Peralatan dan Mesin		39.617.792.850,00	53.224.234.629,00
	Belanja Gedung dan Bangunan		109.266.232.425,00	88.642.312.669,00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		307.877.274.991,00	63.669.490.489,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya		6.956.315.654,00	5.033.170.512,00
	Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00
	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		472.073.723.451,00	220.174.030.783,00
	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan</i>		(472.073.723.451,00)	(220.174.030.783,00)
III	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.5.3		
III.1.	Arus Masuk Kas			
	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman Perguliran Modal		570.115.456,00	192.807.336,00
	<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		570.115.456,00	192.807.336,00
III.2.	Arus Keluar Kas			
	Pembentukan Dana Cadangan		16.000.000.000,00	0,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		16.561.000.000,00	13.500.000.000,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	118.633.202,00
	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		32.561.000.000,00	13.618.633.202,00
	<i>Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Pembiayaan</i>		(31.990.884.544,00)	(13.425.825.866,00)
IV	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	5.5.4		
IV.1.	Arus Masuk Kas			

	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga			
	~ Iuran wajib Pegawai		54.023.284.133,00	54.800.220.377,00
	~ Tabungan Uang Muka Perumahan		1.075.314.000,00	1.105.269.000,00
	~ Subsidi Askes		16.308.491.059,00	16.514.286.102,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan		45.311.421.357,00	50.427.891.205,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 22		1.078.289.341,00	1.454.477.370,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 23		9.991.708.133,00	3.741.527.493,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 25		0,00	6.082.030,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 4 (2)		253.391.965,00	305.240.251,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 26		0,00	18.776.500,00
	~ Pajak PPn		50.267.131.716,00	27.032.735.147,00
	~ BPJS Ketenagakerjaan		2.662.804.320,00	2.192.728.024,00
	~ Penerimaan kiriman uang (R/K SKPD)		50.313.790,00	0,00
	<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		181.022.149.814,00	157.599.233.499,00
IV.2.	Arus Keluar Kas			
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga			
	~ Iuran wajib Pegawai		54.023.324.133,00	54.800.180.377,00
	~ Tabungan Uang Muka Perumahan		1.075.314.000,00	1.105.269.000,00
	~ Subsidi Askes		16.308.491.059,00	16.514.286.102,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan		45.312.680.604,00	50.426.631.958,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 22		1.078.482.364,00	1.454.284.347,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 23		9.995.444.478,00	3.737.791.148,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 25		0,00	6.082.030,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 4 (2)		253.391.965,00	305.240.251,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 26		0,00	18.776.500,00
	~ Pajak PPn		50.287.100.261,00	27.012.766.602,00
	~ BPJS Ketenagakerjaan		2.663.777.443,00	2.191.754.901,00
	~ Pengeluaran kiriman uang (R/K SKPD)		0,00	84.216.290,00
	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		180.998.006.307,00	157.657.279.506,00
	<i>Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Non Anggaran</i>		24.143.507,00	(58.046.007,00)
	KENAIKAN / (PENURUNAN KAS)		(273.390.996.526,00)	140.874.850.910,00

	Saldo Awal Kas di BUD		359.541.187.247,00	218.666.336.337,00
	Saldo Akhir Kas di BUD		86.150.190.721,00	359.541.187.247,00
	Saldo Akhir Kas di BLUD		33.549.009.531,60	53.092.218.534,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	50.343.790,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
	Saldo Akhir Kas		119.699.200.252,60	412.683.749.571,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH		TA 2016		TA 2015
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Belanja Penunjang Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00	3.780.000.000,00	3.761.100.000,00
2	Belanja Tunjangan Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
Jumlah		4.380.000.000,00	4.380.000.000,00	4.361.100.000,00

- a. Biaya Pemungutan Pajak
Realisasi Biaya Pemungutan Pajak TA 2016 sebesar Rp393.689.395,00 dan TA 2015 sebesar Rp438.444.883,00.
- b. Insentif Pemungutan Pajak Daerah
Realisasi Insentif Pemungutan Pajak Daerah TA 2016 sebesar Rp3.291.757.519,00 dan TA 2015 sebesar Rp2.639.126.411,00 dengan rincian sebagai berikut:

Insentif Pajak Daerah		TA 2016		TA 2015
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		Rp	Rp	Rp
1	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	21.437.478,00	21.437.478,00	-
2	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	85.400.910,00	85.400.910,00	-
3	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	4.410.000,00	4.410.000,00	-
4	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	97.500.000,00	97.500.000,00	-
5	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak	1.575.000.000,00	1.550.000.000,00	-

Insentif Pajak Daerah		TA 2016		TA 2015
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		Rp	Rp	Rp
	Penerangan Jalan			
6	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	3.200.000,00	2.000.000,00	-
7	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	13.000.000,00	4.500.000,00	-
8	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	450.000,00	150.000,00	-
9	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	38.875.000,00	3.375.000,00	-
10	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan	876.113.612,00	829.234.131,00	-
11	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - BPHTB	835.298.000,00	693.750.000,00	-
12	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	-	2.639.126.411,00
Jumlah		3.550.685.000,00	3.291.757.519,00	2.639.126.411,00

c. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Realisasi Insentif Pemungutan Retribusi Daerah TA 2016 Rp638.465.038,00 dan TA 2015 sebesar Rp556.826.804,00 dengan rincian sebagai berikut:

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		TA 2016		TA 2015
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		Rp	Rp	Rp
1	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	3.603.000,00	-	-
2	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum	88.000.000,00	13.200.000,00	-

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		TA 2016		TA 2015
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		Rp	Rp	Rp
3	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	153.917.000,00	152.405.589,00	-
4	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	72.500.000,00	52.637.810,00	-
5	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair	1.081.000,00	810.938,00	-
6	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi	60.000.000,00	-	-
7	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	114.294.000,00	42.497.094,00	-
8	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal	14.642.000,00	10.981.950,00	-
9	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus parker	20.910.000,00	13.091.041,00	-
10	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah Raga	251.600.000,00	186.801.350,00	-
11	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	206.227.000,00	166.039.266,00	556.826.804,00
Jumlah		986.774.000,00	638.465.038,00	556.826.804,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Audited)

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Reff CaLK	TAHUN ANGGARAN 2017			REALISASI TA 2016
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN - LRA	5.1.1				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA	5.1.1.a	370.098.012.000,00	375.531.165.351,20	101,47	316.051.189.733,60
4.1.1	Pajak Daerah - LRA	5.1.1.a.1	87.429.350.000,00	96.425.287.892,00	110,29	69.810.605.561,00
4.1.2	Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.a.2	21.616.810.000,00	20.047.124.895,00	92,74	21.313.939.246,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.a.3	25.749.140.000,00	25.475.140.654,00	98,94	11.403.678.765,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA	5.1.1.a.4	235.302.712.000,00	233.583.611.910,20	99,27	213.522.966.161,60
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	5.1.1.b	1.978.459.658.000,00	1.921.568.586.197,00	97,12	1.835.602.482.074,00
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA	5.1.1.b.1	1.560.846.506.000,00	1.505.671.807.702,00	96,47	1.493.483.951.400,00
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.b.1.1	39.205.580.702,00	29.750.032.332,00	75,88	32.837.994.113,00
4.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) - LRA	5.1.1.b.1.2	9.849.997.298,00	8.610.348.281,00	87,41	7.954.565.304,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum - LRA	5.1.1.b.1.3	1.141.687.714.000,00	1.141.687.714.000,00	100,00	1.162.102.111.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus - LRA	5.1.1.b.1.4	370.103.214.000,00	325.623.713.089,00	87,98	290.589.280.983,00
4.2.2	Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	5.1.1.b.2	234.026.299.000,00	234.026.299.000,00	100,00	183.211.736.000,00
4.2.2.1	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.2	Dana Keistimewaan - LRA					
4.2.2.3	Dana Penyesuaian		234.026.299.000,00	234.026.299.000,00	100,00	183.211.736.000,00
4.2.3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	5.1.1.b.3	163.649.663.000,00	164.221.871.495,00	100,35	138.509.897.674,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA		163.649.663.000,00	164.221.871.495,00	100,35	138.509.897.674,00
4.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.3. 3	Dana Otonomi Khusus - LRA		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	5.1.1.b.4	19.937.190.000,00	17.648.608.000,00	88,52	20.396.897.000,00
4.2.4. 1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA		19.937.190.000,00	17.648.608.000,00	88,52	20.396.897.000,00
4.2.4. 2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA		0,00	0,00		0,00
4.2.4. 3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA		0,00	0,00		0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LRA	5.1.1.c	162.524.707.000,00	153.666.800.582,00	94,55	9.507.387.780,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA		162.524.707.000,00	153.666.800.582,00	94,55	9.507.387.780,00
4.3.2	Pendapatan Dana Darurat - LRA		0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Pendapatan Lainnya - LRA		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN		2.511.082.377.000,00	2.450.766.552.130,20	97,60	2.161.161.059.587,60
5	BELANJA	5.1.2	2.222.208.581.000,00	2.056.964.445.808,00	92,56	2.070.201.492.705,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.a	1.734.558.834.300,00	1.611.513.759.083,00	92,91	1.546.321.787.664,00
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.a.1	1.134.211.744.300,00	1.062.190.303.509,00	93,65	1.108.043.062.768,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.a.2	522.150.409.500,00	477.065.476.668,00	91,37	373.404.099.120,00
5.1.3	Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.a.3	60.950.680.500,00	55.420.678.906,00	90,93	49.006.197.776,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.a.4	17.246.000.000,00	16.837.300.000,00	97,63	15.868.428.000,00
5.2	BELANJA MODAL	5.1.2.b	479.649.746.700,00	437.758.902.809,00	91,27	516.642.310.814,00
5.2.1	Belanja Tanah	5.1.2.b.1	9.610.000.000,00	9.082.599.234,00	94,51	8.356.107.531,00
5.2.2	Belanja Peralatan Mesin	5.1.2.b.2	80.663.373.000,00	81.344.975.420,00	100,84	71.089.912.876,00
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.b.3	109.895.671.700,00	98.542.968.351,00	89,67	118.017.149.842,00
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.b.4	274.271.872.000,00	244.257.718.104,00	89,06	311.792.586.911,00
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.b.5	5.208.830.000,00	4.530.641.700,00	86,98	7.386.553.654,00
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.b.6	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.c	8.000.000.000,00	7.691.783.916,00	96,15	7.237.394.227,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga		8.000.000.000,00	7.691.783.916,00	96,15	7.237.394.227,00
6	TRANSFER	5.1.3	397.762.456.000,00	396.040.092.454,00	99,57	351.927.031.374,00
6.1	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	5.1.3.a	10.029.933.000,00	9.980.183.500,00	99,50	8.906.448.453,00
6.1.1	Bagi Hasil Pajak		7.804.975.000,00	7.799.361.400,00	99,93	6.874.031.611,00
6.1.2	Bagi hasil Pendapatan lainnya		2.224.958.000,00	2.180.822.100,00	98,02	2.032.416.842,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.b	387.732.523.000,00	386.059.908.954,00	99,57	343.020.582.921,00

6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		386.663.619.000,00	385.060.166.994,00	99,59	342.020.840.961,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		1.068.904.000,00	999.741.960,00	93,53	999.741.960,00
	SURPLUS / (DIFISIT)		(108.888.660.000,00)	(2.237.986.131,80)	2,06	(260.967.464.491,40)
7	PEMBIAYAAN	5.1.4				
7.1	PENERIMAAN DAERAH	5.1.4.a				
7.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)		119.670.201.000,00	119.670.200.252,60	100,00	412.628.549.288,00
7.1.2	Pencairan Dana Cadangan		13.159.459.000,00	13.159.458.900,00	0,00	0,00
7.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.5	Penerimaan Kembali Piutang		0,00	274.420.475,00	0,00	570.115.456,00
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH		132.829.660.000,00	133.104.079.627,60	100,21	413.198.664.744,00
7.2	PENGELUARAN DAERAH	5.1.4.b				
7.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	16.000.000.000,00
7.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		13.941.000.000,00	13.941.000.000,00	100,00	16.561.000.000,00
7.2.3	Pembayaran Pokok Utang		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		23.941.000.000,00	23.941.000.000,00	100,00	32.561.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO		108.888.660.000,00	109.163.079.627,60	100,25	380.637.664.744,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	5.1.5	0,00	106.925.093.495,80		119.670.200.252,60

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Slawi, 22 Mei 2018

Pjs. BUPATI TEGAL,

Drs. SINOENG NOEGROHO RACHMADI, MM



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PER 31 DESEMBER 2017 DAN TAHUN 2016
(Audited)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Reff. CaLK	TAHUN 2017	TAHUN 2016
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.a	82.457.061.138,00	86.150.190.721,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.b	41.177.553,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.c	392.454.200,00	0,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.d	21.043.264.770,80	33.549.009.531,60
Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.e	3.022.801.141,00	9.775.511.701,83
Setara Kas			
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pendapatan	5.3.1.1.f	85.858.253.380,00	67.063.815.524,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.g	10.975.611.326,00	11.253.891.801,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.h	(54.329.647.191,61)	(40.792.138.605,91)
Beban Dibayar Dimuka		0,00	-
Persediaan	5.3.1.1.i	30.855.387.371,98	28.099.549.296,02
Jumlah Aset Lancar		180.316.363.689,18	195.099.829.969,54
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
Investasi Nonpermanen			
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Dana Bergulir		0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang		0,00	0,00

Investasi Non permanen Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Investasi Nonpermanen		0,00	0,00
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.a	172.877.114.875,85	148.021.722.955,12
Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Investasi Permanen		172.877.114.875,85	148.021.722.955,12
Jumlah Investasi Jangka Panjang		172.877.114.875,85	148.021.722.955,12
ASET TETAP	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.a	661.991.402.211,00	637.353.841.778,00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.b	504.541.413.485,80	546.484.854.131,09
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.c	1.050.064.517.465,00	946.556.922.025,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.d	1.642.639.132.175,00	1.460.850.835.723,00
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.e	87.406.387.745,92	92.205.365.867,99
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.f	7.001.248.037,00	7.254.197.137,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.g	(1.408.494.339.352,09)	(1.325.849.891.290,27)
Jumlah Aset Tetap		2.545.149.761.767,63	2.364.856.125.371,81
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan	5.3.1.4	14.641.716.729,00	16.486.246.571,00
Jumlah Dana Cadangan		14.641.716.729,00	16.486.246.571,00
ASET LAINNYA	5.3.1.5		
Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.5.a	335.147.291,61	336.147.291,61
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.b	9.450.167.025,00	9.450.167.025,00
Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.c	2.145.891.740,00	1.039.388.854,13
Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.d	(1.223.235.366,66)	
Aset lain-lain	5.3.1.5.e	159.808.724.302,23	59.914.947.974,36
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.3.1.5.f	(92.432.414.067,20)	
Jumlah Aset Lainnya		78.084.280.924,98	70.740.651.145,10
JUMLAH ASET		2.991.069.237.986,63	2.795.204.576.012,57
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1	31.665.307,00	34.072.978,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.2	2.562.086.430,00	2.518.231.585,00
Utang Beban	5.3.2.3	31.330.911.598,00	18.617.048.014,99

Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.4	449.432.684,00	24.195.762.571,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		34.374.096.019,00	45.365.115.148,99
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		34.374.096.019,00	45.365.115.148,99
EKUITAS			
EKUITAS	5.3.3	2.956.695.141.967,63	2.749.839.460.863,58
Jumlah EKUITAS		2.956.695.141.967,63	2.749.839.460.863,58
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.991.069.237.986,63	2.795.204.576.012,57

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Slawi, 22 Mei 2018

Pjs. BUPATI TEGAL,

Drs. SINOENG NOEGROHO RACHMADI, MM



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Audited)

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Reff CaLK	2017	2016
I	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.6.1		
I.1.	Arus Masuk Kas			
	Pendapatan Pajak Daerah		97.179.813.740,00	69.810.605.561,00
	Pendapatan Retribusi Daerah		19.654.670.695,00	21.313.939.246,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		25.475.140.654,00	11.403.678.765,00
	Lain-lain PAD yang Sah		232.829.086.062,20	34.600.657.350,00
	Dana Bagi Hasil Pajak		29.750.032.332,00	32.837.994.113,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		8.610.348.281,00	7.954.565.304,00
	Dana Alokasi Umum		1.141.687.714.000,00	1.162.102.111.000,00
	Dana Alokasi Khusus		325.623.713.089,00	290.589.280.983,00
	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
	Dana Penyesuaian		234.026.299.000,00	183.211.736.000,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		164.221.871.495,00	138.509.897.674,00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
	Bantuan Keuangan dari pemerintah Daerah Provinsi lainnya		17.648.608.000,00	20.396.897.000,00
	Pendapatan Hibah		153.666.800.582,00	9.507.387.780,00
	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00
	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		2.450.374.097.930,20	1.982.238.750.776,00
I.2.	Arus Keluar Kas			
	Belanja Pegawai		1.033.229.512.409,00	1.108.043.062.768,00
	Belanja Barang		506.026.267.768,00	219.507.168.669,00
	Bunga		0,00	0,00
	Subsidi		0,00	0,00
	Hibah		55.420.678.906,00	49.006.197.776,00
	Bantuan Sosial		16.837.300.000,00	15.868.428.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan		386.059.908.954,00	343.020.582.921,00
	Belanja Tak Terduga		7.691.783.916,00	7.237.394.227,00

	Bagi Hasil Pajak		7.799.361.400,00	6.874.031.611,00
	Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		2.180.822.100,00	2.032.416.842,00
	Jumlah Arus Keluar Kas		2.015.245.635.453,00	1.751.589.282.814,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		435.128.462.477,20	230.649.467.962,00
II	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.6.2		
II.1.	Arus Masuk Kas			
	Pendapatan Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap		0,00	0,00
	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
II.2.	Arus Keluar Kas			
	Belanja Tanah		9.082.599.234,00	8.356.107.531,00
	Belanja Peralatan dan Mesin		81.344.975.420,00	39.617.792.850,00
	Belanja Gedung dan Bangunan		98.542.968.351,00	109.266.232.425,00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		244.257.718.104,00	307.877.274.991,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya		4.530.641.700,00	6.956.315.654,00
	Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas		437.758.902.809,00	472.073.723.451,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		(437.758.902.809,00)	(472.073.723.451,00)
III	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.6.3		
III.1.	Arus Masuk Kas			
	Pencairan Dana Cadangan		13.159.458.900,00	0,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman Perguliran Modal		274.420.475,00	570.115.456,00
	Jumlah Arus Masuk Kas		13.433.879.375,00	570.115.456,00
III.2.	Arus Keluar Kas			
	Pembentukan Dana Cadangan		10.000.000.000,00	16.000.000.000,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		13.941.000.000,00	16.561.000.000,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas		23.941.000.000,00	32.561.000.000,00
	Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Pembiayaan		(10.507.120.625,00)	(31.990.884.544,00)
IV	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	5.6.4		

IV.1.	Arus Masuk Kas			
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga			
	~ Iuran wajib Pegawai		48.684.552.834,00	54.023.284.133,00
	~ Tabungan Uang Muka Perumahan		958.069.000,00	1.075.314.000,00
	~ Subsidi Askes		14.701.607.409,00	16.308.491.059,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan		34.259.309.776,00	45.311.421.357,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 22		1.002.790.079,00	1.078.289.341,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 23		1.873.960.429,00	9.991.708.133,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 25		0,00	0,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 4 (2)		5.179.273.204,00	253.391.965,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 26		0,00	0,00
	~ Pajak PPn		37.675.837.602,00	50.267.131.716,00
	~ BPJS Ketenagakerjaan		2.399.261.775,00	2.662.804.320,00
	~ Penerimaan kiriman uang (R/K SKPD)		0,00	50.313.790,00
	~ Deposito			
	<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		146.734.662.108,00	181.022.149.814,00
IV.2.	Arus Keluar Kas			
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga			
	~ Iuran wajib Pegawai		48.684.552.834,00	54.023.324.133,00
	~ Tabungan Uang Muka Perumahan		958.069.000,00	1.075.314.000,00
	~ Subsidi Askes		14.701.607.409,00	16.308.491.059,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan		34.259.309.776,00	45.312.680.604,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 22		1.002.790.079,00	1.078.482.364,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 23		1.873.960.429,00	9.995.444.478,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 25		0,00	0,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 4 (2)		5.179.273.204,00	253.391.965,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 26		0,00	0,00
	~ Pajak PPn		37.675.837.602,00	50.287.100.261,00
	~ BPJS Ketenagakerjaan		2.399.261.775,00	2.663.777.443,00
	~ Pengeluaran kiriman uang (R/K SKPD)		38.512.246,00	0,00
	~ Deposito			
	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		146.773.174.354,00	180.998.006.307,00
	<i>Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Non Anggaran</i>		(38.512.246,00)	24.143.507,00
	KENAIKAN / (PENURUNAN KAS)		(13.176.073.202,80)	(273.390.996.526,00)

	Saldo Awal Kas di BUD		119.699.200.252,60	359.541.187.247,00
	Saldo Akhir Kas di BUD		106.523.127.049,80	86.150.190.721,00
	Saldo Akhir Kas di BLUD			33.549.009.531,60
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		38.512.246,00	0,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		392.454.200,00	0,00
	Saldo Akhir Kas		106.954.093.495,80	119.699.200.252,60

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Slawi, 22 Mei 2018

Pjs. BUPATI TEGAL,

Drs. SINOENG NOEGROHO RACHMADI, MM



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH		TA 2017		TA 2016
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
(a)	Belanja Penunjang Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.500.000.000,00	4.817.400.000,00	3.780.000.000,00
(b)	Belanja Tunjangan Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
Jumlah		7.100.000.000,00	5.417.400.000,00	4.380.000.000,00

d. Biaya Pemungutan Pajak

Realisasi Biaya Pemungutan Pajak TA 2017 sebesar Rp270.838.796,00 dan
TA 2016 sebesar Rp393.689.395,00.

e. Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Realisasi Insentif Pemungutan Pajak Daerah TA 2017 sebesar Rp3.961.086.477,00
dan TA 2016 sebesar Rp3.291.757.519,00 dengan rincian sebagai berikut:

Insentif Pajak Daerah		TA 2017		TA 2016
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		Rp	Rp	Rp
(a)	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	0,00	0,00	21.437.478,00
(b)	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	0,00	0,00	85.400.910,00
(c)	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	0,00	0,00	4.410.000,00
(d)	Belanja Insentif Pemungutan	0,00	0,00	97.500.000,00

	Pajak Daerah - Pajak Reklame			
(e)	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	1.550.000.000,00
(f)	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	0,00	0,00	2.000.000,00
(g)	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	0,00	0,00	4.500.000,00
(h)	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	150.000,00
(i)	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	3.375.000,00
(j)	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan	0,00	0,00	829.234.131,00
(k)	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - BPHTB	0,00	0,00	693.750.000,00
(l)	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	4.358.967.000,00	3.961.086.477,00	0,00
Jumlah		4.358.967.000,00	3.961.086.477,00	3.291.757.519,00

f. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Realisasi Insentif Pemungutan Retribusi Daerah TA 2017 Rp657.731.888,00 dan TA 2016 sebesar Rp638.465.038,00 dengan rincian sebagai berikut:

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		TA 2017		TA 2016
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		Rp	Rp	Rp
(a)	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum	0,00	0,00	13.200.000,00

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		TA 2017		TA 2016
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		Rp	Rp	Rp
(b)	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	0,00	0,00	152.405.589,00
(c)	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	52.637.810,00
(d)	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair	0,00	0,00	810.938,00
(e)	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	42.497.094,00
(f)	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Terminal	0,00	0,00	10.981.950,00
(g)	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus parkir	0,00	0,00	13.091.041,00
(h)	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah Raga	0,00	0,00	186.801.350,00
(i)	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.280.222.000,00	657.731.888,00	166.039.266,00
Jumlah		1.280.222.000,00	657.731.888,00	638.465.038,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(audited)

*(dalam
Rupiah)*

NO	URAIAN	Reff CaLK	TAHUN ANGGARAN 2018			REALISASI TA 2017
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN - LRA	5.1.1				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA	5.1.1.a	418.830.489.000,00	371.345.954.410,62	88,66	375.531.165.351,20
4.1.1	Pajak Daerah - LRA	5.1.1.a.1	105.528.154.000,00	107.035.473.258,00	101,43	96.425.287.892,00
4.1.2	Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.a.2	26.613.490.000,00	17.833.906.345,00	67,01	20.047.124.895,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.a.3	21.044.967.000,00	12.576.924.389,00	59,76	25.475.140.654,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA	5.1.1.a.4	265.643.878.000,00	233.899.650.418,62	88,05	233.583.611.910,20
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	5.1.1.b	2.072.704.414.000,00	2.008.586.726.208,00	96,91	1.921.568.586.197,00
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA	5.1.1.b.1	1.556.105.684.000,00	1.513.203.330.274,00	97,24	1.505.671.807.702,00
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.b.1.1	71.227.065.000,00	21.232.470.187,00	29,81	29.750.032.332,00
4.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) - LRA	5.1.1.b.1.2	8.626.340.000,00	8.188.805.102,00	94,93	8.610.348.281,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum - LRA	5.1.1.b.1.3	1.144.494.182.000,00	1.144.494.182.000,00	100,00	1.141.687.714.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus - LRA	5.1.1.b.1.4	331.758.097.000,00	339.287.872.985,00	102,27	325.623.713.089,00
4.2.2	Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	5.1.1.b.2	317.703.163.000,00	317.703.162.997,00	100,00	234.026.299.000,00
4.2.2.1	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.2	Dana Keistimewaan - LRA					
4.2.2.3	Dana Penyesuaian		317.703.163.000,00	317.703.162.997,00	100,00	234.026.299.000,00
4.2.3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	5.1.1.b.3	188.026.177.000,00	167.207.542.937,00	88,93	164.221.871.495,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA		188.026.177.000,00	167.207.542.937,00	88,93	164.221.871.495,00
4.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.3.3	Dana Otonomi Khusus - LRA		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	5.1.1.b.4	10.869.390.000,00	10.472.690.000,00	96,35	17.648.608.000,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA		10.869.390.000,00	10.472.690.000,00	96,35	17.648.608.000,00
4.2.4.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA		0,00	0,00		0,00
4.2.4.3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA		0,00	0,00		0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LRA	5.1.1.c	152.846.800.000,00	143.502.277.552,00	93,89	153.666.800.582,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA		152.846.800.000,00	143.502.277.552,00	93,89	153.666.800.582,00
4.3.2	Pendapatan Dana Darurat - LRA		0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Pendapatan Lainnya - LRA		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN		2.644.381.703.000,00	2.523.434.958.170,62	95,43	2.450.766.552.130,20
5	BELANJA	5.1.2	2.304.909.079.000,00	2.126.439.309.268,00	92,26	2.056.964.445.808,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.a	1.828.190.877.000,00	1.704.320.211.333,00	93,22	1.611.513.759.083,00
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.a.1	1.142.137.812.000,00	1.108.018.481.665,00	97,01	1.062.190.303.509,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.a.2	558.506.679.100,00	483.511.537.220,00	86,57	477.065.476.668,00
5.1.3	Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.a.3	106.713.608.900,00	92.525.895.948,00	86,70	55.420.678.906,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.a.4	20.832.777.000,00	20.264.296.500,00	97,27	16.837.300.000,00
5.2	BELANJA MODAL	5.1.2.b	470.718.202.000,00	417.983.021.935,00	88,80	437.758.902.809,00
5.2.1	Belanja Tanah	5.1.2.b.1	6.250.489.000,00	3.148.086.385,00	50,37	9.082.599.234,00
5.2.2	Belanja Peralatan Mesin	5.1.2.b.2	95.972.151.550,00	96.724.967.692,00	100,78	81.344.975.420,00
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.b.3	140.800.907.400,00	109.978.782.599,00	78,11	98.542.968.351,00
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.b.4	226.050.504.050,00	206.618.577.009,00	91,40	244.257.718.104,00
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.b.5	1.644.150.000,00	1.512.608.250,00	92,00	4.530.641.700,00
5.2.6	Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.c	6.000.000.000,00	4.136.076.000,00	68,93	7.691.783.916,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga		6.000.000.000,00	4.136.076.000,00	68,93	7.691.783.916,00
6	TRANSFER	5.1.3	450.360.260.000,00	448.247.773.974,00	99,53	396.040.092.454,00
6.1	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	5.1.3.a	10.029.933.000,00	9.012.448.100,00	89,86	9.980.183.500,00
6.1.1	Bagi Hasil Pajak		7.804.975.000,00	7.385.046.100,00	94,62	7.799.361.400,00
6.1.2	Bagi hasil Pendapatan lainnya		2.224.958.000,00	1.627.402.000,00	73,14	2.180.822.100,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.b	440.330.327.000,00	439.235.325.874,00	99,75	386.059.908.954,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		439.261.423.000,00	438.166.422.010,00	99,75	385.060.166.994,00

6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		1.068.904.000,00	1.068.903.864,00	100,00	999.741.960,00
	SURPLUS / (DIFISIT)		(110.887.636.000,00)	(51.252.125.071,38)	46,22	(2.237.986.131,80)
7	PEMBIAYAAN	5.1.4				
7.1	PENERIMAAN DAERAH	5.1.4.a				
7.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)		106.925.094.000,00	106.925.093.495,80	100,00	119.670.200.252,60
7.1.2	Pencairan Dana Cadangan		12.840.542.000,00	12.840.541.100,00	0,00	13.159.458.900,00
7.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.5	Penerimaan Kembali Piutang		0,00	211.227.891,00	0,00	274.420.475,00
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH		119.765.636.000,00	119.976.862.486,80	100,18	133.104.079.627,60
7.2	PENGELUARAN DAERAH	5.1.4.b				
7.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
7.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		8.849.000.000,00	8.849.000.000,00	100,00	13.941.000.000,00
7.2.10	Pengembalian Biaya Administrasi Pembukaan Rekening BLUD Puskesmas		29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		8.878.000.000,00	8.878.000.000,00	100,00	23.941.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO		110.887.636.000,00	111.098.862.486,80	100,19	109.163.079.627,60
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	5.1.5	0,00	59.846.737.415,42		106.925.093.495,80

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI TEGAL,

Dra. UMI AZIZAH



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PER 31 DESEMBER 2018 DAN TAHUN 2017
(audited)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Reff. CaLK	TAHUN 2018	TAHUN 2017
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.a	41.645.810.899,00	82.457.061.138,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.b	20.199.984,00	41.177.553,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.c	205.696.500,00	392.454.200,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.d	15.920.408.051,82	21.043.264.770,80
Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.e	2.087.440.687,00	3.022.801.141,00
Setara Kas			
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pendapatan	5.3.1.1.f	105.272.470.932,00	85.858.253.380,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.g	10.752.515.735,00	10.975.611.326,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.h	(59.221.213.210,70)	(54.329.647.191,61)
Beban Dibayar Dimuka		0,00	-
Persediaan	5.3.1.1.i	28.838.889.940,25	30.855.387.371,98
Jumlah Aset Lancar		145.522.219.518,37	180.316.363.689,18
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
Investasi Nonpermanen			
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Dana Bergulir		0,00	0,00

Deposito Jangka Panjang		0,00	0,00
Investasi Non permanen Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Investasi Nonpermanen		0,00	0,00
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.a	192.174.971.510,84	172.877.114.875,85
Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Investasi Permanen		192.174.971.510,84	172.877.114.875,85
Jumlah Investasi Jangka Panjang		192.174.971.510,84	172.877.114.875,85
ASET TETAP	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.a	665.383.833.176,00	661.991.402.211,00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.b	559.859.009.535,80	504.541.413.485,80
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.c	1.167.292.606.588,00	1.050.064.517.465,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.d	1.852.140.757.536,00	1.642.639.132.175,00
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.e	114.527.338.064,92	87.406.387.745,92
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.f	0,00	7.001.248.037,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.g	(1.607.081.885.963,26)	(1.408.494.339.352,09)
Jumlah Aset Tetap		2.752.121.658.937,46	2.545.149.761.767,63
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan	5.3.1.4	0,00	14.641.716.729,00
Jumlah Dana Cadangan		0,00	14.641.716.729,00
ASET LAINNYA	5.3.1.5		
Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.5.a	335.147.291,61	335.147.291,61
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.b	9.450.167.025,00	9.450.167.025,00
Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.c	2.413.753.740,00	2.145.891.740,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.d	(1.594.242.238,58)	(1.223.235.366,66)
Aset lain-lain	5.3.1.5.e	147.474.419.981,87	159.808.724.302,23
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.3.1.5.f	(80.285.345.407,71)	(92.432.414.067,20)
Jumlah Aset Lainnya		77.793.900.392,19	78.084.280.924,98
JUMLAH ASET		3.167.612.750.358,86	2.991.069.237.986,63
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1	0,00	31.665.307,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.2	1.754.617.633,00	2.562.086.430,00

Utang Beban	5.3.2.3	30.540.045.246,00	31.330.911.598,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.4	449.246.684,00	449.432.684,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		32.743.909.563,00	34.374.096.019,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		32.743.909.563,00	34.374.096.019,00
EKUITAS			
EKUITAS	5.3.3	3.134.868.840.795,86	2.956.695.141.967,63
Jumlah EKUITAS		3.134.868.840.795,86	2.956.695.141.967,63
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.167.612.750.358,86	2.991.069.237.986,63

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI TEGAL,

Dra. UMI AZIZAH



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(audited)

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Reff CaLK	2018	2017
I	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.6.1		
I.1.	Arus Masuk Kas			
	Pendapatan Pajak Daerah		106.989.918.258,00	97.179.813.740,00
	Pendapatan Retribusi Daerah		18.066.219.045,00	19.654.670.695,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		12.576.924.389,00	25.475.140.654,00
	Lain-lain PAD yang Sah		233.354.274.138,62	232.829.086.062,20
	Dana Bagi Hasil Pajak		21.232.470.187,00	29.750.032.332,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		8.188.805.102,00	8.610.348.281,00
	Dana Alokasi Umum		1.144.494.182.000,00	1.141.687.714.000,00
	Dana Alokasi Khusus		339.287.872.985,00	325.623.713.089,00
	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
	Dana Penyesuaian		317.703.162.997,00	234.026.299.000,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		167.207.542.937,00	164.221.871.495,00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
	Bantuan Keuangan dari pemerintah Daerah Provinsi lainnya		10.472.690.000,00	17.648.608.000,00
	Pendapatan Hibah		143.502.277.552,00	153.666.800.582,00
	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00
	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		2.523.076.339.590,62	2.450.374.097.930,20
I.2.	Arus Keluar Kas			
	Belanja Pegawai		1.108.018.481.665,00	1.033.229.512.409,00
	Belanja Barang		483.511.537.220,00	506.026.267.768,00
	Bunga		0,00	0,00
	Subsidi		0,00	0,00
	Hibah		92.525.895.948,00	55.420.678.906,00
	Bantuan Sosial		20.264.296.500,00	16.837.300.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan		439.235.325.874,00	386.059.908.954,00
	Belanja Tak Terduga		4.136.076.000,00	7.691.783.916,00
	Bagi Hasil Pajak		7.385.046.100,00	7.799.361.400,00
	Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00

	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		1.627.402.000,00	2.180.822.100,00
	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		2.156.704.061.307,00	2.015.245.635.453,00
	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>		366.372.278.283,62	435.128.462.477,20
II	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.6.2		
II.1.	Arus Masuk Kas			
	Pendapatan Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		230.989.000,00	0,00
	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		41.247.280,00	0,00
	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		6.100.000,00	0,00
	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		28.520.000,00	0,00
	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		238.520.000,00	0,00
	<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		545.376.280,00	0,00
II.2.	Arus Keluar Kas			
	Belanja Tanah		3.148.086.385,00	9.082.599.234,00
	Belanja Peralatan dan Mesin		96.724.967.692,00	81.344.975.420,00
	Belanja Gedung dan Bangunan		109.978.782.599,00	98.542.968.351,00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		206.618.577.009,00	244.257.718.104,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya		1.512.608.250,00	4.530.641.700,00
	Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00
	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		417.983.021.935,00	437.758.902.809,00
	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan</i>		(417.437.645.655,00)	(437.758.902.809,00)
III	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.6.3		
III.1.	Arus Masuk Kas			
	Pencairan Dana Cadangan		12.840.541.100,00	13.159.458.900,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			0,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman Perguliran Modal		211.227.891,00	274.420.475,00
	<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		13.051.768.991,00	13.433.879.375,00
III.2.	Arus Keluar Kas			
	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	10.000.000.000,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		8.849.000.000,00	13.941.000.000,00
	Pengembalian Biaya Administrasi Pembukaan Rekening BLUD Puskesmas		29.000.000,00	0,00
	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		8.878.000.000,00	23.941.000.000,00
	<i>Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Pembiayaan</i>		4.173.768.991,00	(10.507.120.625,00)
IV	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	5.6.4		
IV.1.	Arus Masuk Kas	\		

	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga			
	~ Iuran wajib Pegawai		46.818.437.919,00	48.684.552.834,00
	~ Tabungan Uang Muka Perumahan		911.625.000,00	958.069.000,00
	~ Subsidi Askes		14.141.847.044,00	14.701.607.409,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan		35.753.653.279,00	34.259.309.776,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 22		1.204.220.160,00	1.002.790.079,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 23		373.803.938,00	1.873.960.429,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 25		0,00	0,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 4 (2)		6.901.105.751,00	5.179.273.204,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 26		0,00	0,00
	~ Pajak PPn		38.747.250.463,00	37.675.837.602,00
	~ BPJS Ketenagakerjaan		3.307.854.162,00	2.399.261.775,00
	~ Penerimaan kiriman uang (R/K SKPD)		38.512.246,00	0,00
	~ Deposito			
	<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		148.198.309.962,00	146.734.662.108,00
IV.2.	Arus Keluar Kas			
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga			
	~ Iuran wajib Pegawai		46.818.437.919,00	48.684.552.834,00
	~ Tabungan Uang Muka Perumahan		911.625.000,00	958.069.000,00
	~ Subsidi Askes		14.141.847.044,00	14.701.607.409,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan		35.753.653.279,00	34.259.309.776,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 22		1.204.220.160,00	1.002.790.079,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 23		373.803.938,00	1.873.960.429,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 25		0,00	0,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 4 (2)		6.901.105.751,00	5.179.273.204,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 26		0,00	0,00
	~ Pajak PPn		38.747.250.463,00	37.675.837.602,00
	~ BPJS Ketenagakerjaan		3.307.854.162,00	2.399.261.775,00
	~ Pengeluaran kiriman uang (R/K SKPD)		20.199.984,00	38.512.246,00
	~ Deposito			
	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		148.179.997.700,00	146.773.174.354,00
	<i>Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Non Anggaran</i>		18.312.262,00	(38.512.246,00)
	KENAIKAN / (PENURUNAN KAS)		(46.873.286.118,38)	(13.176.073.202,80)

	Saldo Awal Kas		106.523.127.049,80	119.699.200.252,60
	Saldo Akhir Kas		59.649.840.931,42	106.523.127.049,80
	Saldo Akhir Kas di BLUD			
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		20.199.984,00	38.512.246,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		205.696.500,00	392.454.200,00
	Saldo Akhir Kas		59.875.737.415,42	106.954.093.495,80

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI TEGAL,

Dra. UMI AZIZAH



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Belanja Penunjang Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.300.000.000,00	6.289.500.000,00	4.817.400.000,00
(2)	Belanja Tunjangan Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	390.000.000,00	600.000.000,00
Jumlah		6.900.000.000,00	6.679.500.000,00	5.417.400.000,00

- 3) Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
 Realisasi Belanja Biaya Pemungutan Pajak PBB TA 2018 sebesar Rp197.364.969,00 dan TA 2017 sebesar Rp270.838.796,00.
- 4) Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah
 Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah TA 2018 sebesar Rp3.237.345.887,00 dan TA 2017 sebesar Rp3.961.086.477,00.
- 5) Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
 Realisasi Belanja Realisasi Insentif Pemungutan Retribusi Daerah TA 2018 Rp580.112.180,00 dan TA 2017 sebesar Rp657.731.888,00.
- 6) Belanja Uang Lembur
 Realisasi Belanja Uang Lembur TA 2018 sebesar Rp2.608.756.600,00 dan TA 2017 sebesar Rp2.608.492.700,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.22. Belanja Uang Lembur

Uang lembur		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Uang Lembur PNS	2.685.377.750,00	2.205.869.600,00	2.338.630.800,00
(2)	Uang Lembur Non PNS	511.768.875,00	402.887.000,00	269.861.900,00
Jumlah		3.197.146.625,00	2.608.756.600,00	2.608.492.700,00

- 7) Belanja Honorarium PNS

Realisasi Belanja Honorarium PNS TA 2018 sebesar Rp24.782.046.075,00 dan TA 2017 sebesar Rp23.433.824.450,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.23. Belanja Honorarium PNS

Honorarium PNS		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.178.365.000,00	4.918.776.125,00	6.122.149.200,00
(2)	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang /Jasa	3.468.408.500,00	3.018.701.500,00	2.856.640.500,00
(3)	Honorarium PNS Lainnya	18.612.214.375,00	16.844.568.450,00	14.455.034.750,00
Jumlah		28.258.987.875,00	24.782.046.075,00	23.433.824.450,00



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGDI : MANAJEMEN, AKUNTANSI, DAN MANAJEMEN PAJAK
(STATUS TERAKREDITASI)

Jl. Halmahera Km. 1 Telp. (0283) 355720 Tegal

Nomor : **129/K/E/FEB/UPS/XI/2018** Tegal, 10 November 2018
Lampiran : -
Perihal : **Ijin Penelitian**

Kepada : Yth. **Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Tegal**
Jl. Piere Tendean, No. 01, Slawi
Di- Kab. Tegal

Dengan hormat, salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis mahasiswa diwajibkan mengadakan penelitian sebagai bahan menyusun skripsi.

Berkenaan dengan hal itu, mohon berkenaan Bapak membantu memberi data yang diperlukan dalam penelitian tersebut kepada mahasiswa :

N a m a : **Livia Margarita**
NPM : 4315500081
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja
Keuangan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2013 –
2017.

Atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih,

Dekan



Manben Jalil, SE, M.M.
NIP. 12351131972

Tembusan :
1. Yth. Kepala BPKAD Kab. Tegal
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS

Alamat : Jl. Piere Tendean No. 1 Slawi Telp. (0283) 492428
Website : www.kesbangpollinmas.tegalkab.go.id

Slawi, 21 Nopember 2018.

Nomor : 070 / 29 / 3012
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Ijin Penelitian

K e p a d a :
Yth.KEPALA BAPPEDA dan LITBANG
KABUPATEN TEGAL
di -
S L A W I

Menarik Surat Permohonan Ijin penelitian :

Dari : Universitas Pancasakti Tegal
Nomor : 129/K/E/FEB/UPS/XI/2018
Tanggal : 10 Nopember 2018

Bersama ini kami beritahukan, bahwa wilayah Kabupaten Tegal akan dilaksanakan Penelitian oleh :

N a m a : Livia Margarita
N P M : 4315500081
Judul : Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan
Kabupatean Tegal Tahun Anggaran 2013 – 2017.

Sehubungan dengan itu kami tidak keberatan atas Penelitian tersebut dalam wilayah Kabupaten Tegal dan bersama ini pula kami lampirkan fotokopi surat rekomendasi dari Dekan Univesitas Pancasakti Tegal.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS
KABUPATEN TEGAL
Kasi Polhubga



Tembusan : Kepada Yth.
1. Bupati Tegal (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

